

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN SUBANG MENURUT PENGELUARAN 2019-2023

VOLUME 8, 2024



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN SUBANG**

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KABUPATEN SUBANG
MENURUT PENGELUARAN
2019 - 2023
VOLUME 8, 2024**

<https://subangkab.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN SUBANG**

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KABUPATEN SUBANG
MENURUT PENGELUARAN 2019 – 2023
Volume 8, 2024**

Katalog : 9302023.3213

ISSN : -

Nomor Publikasi : 32130.24003

Ukuran Buku: 17,6 x 25 cm

Jumlah Halaman: xiv + 80 halaman

Penyusun Naskah:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Subang

Penyunting:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Subang

Pembuat Kover:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Subang

Penerbit:

©Badan Pusat Statistik Kabupaten Subang

Dicetak oleh:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Subang

Sumber Ilustrasi:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Subang

Dilarang mereproduksi dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Subang

Tim Penyusun

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KABUPATEN SUBANG
MENURUT PENGELUARAN 2019 - 2023
Volume 8, 2024**

Pengarah

Muhammad Sholihin, S.E., M.M

Penanggung Jawab

Tri Handayani, SST, M.Sc

Penyunting

Indra Satrio, S.Si., M.E

Pengolah Data dan Penulis Naskah

Indra Satrio, S.Si., M.E

Aan Heriyana S.Si, M.S.E.

Penata Letak

Tri Handayani, SST, M.Sc

KATA PENGANTAR

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah (provinsi maupun kabupaten/kota). Perangkat data ini dapat pula digunakan untuk kepentingan dan tujuan lain, seperti sebagai dasar pengembangan model-model ekonomi dalam rangka menyusun formulasi kebijakan, tingkat percepatan uang beredar (*velocity of money*), pendalaman sektor keuangan (*financial deepening*), penetapan pajak, kajian ekspor dan impor dan sebagainya.

Publikasi ini secara khusus membahas mengenai PDRB menurut pendekatan pengeluaran. Pendekatan ini dirinci menjadi beberapa komponen, yaitu: Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Perubahan Inventori), Ekspor Luar Negeri, Impor Luar Negeri, serta Ekspor Neto Antar Daerah (ekspor antar daerah dikurangi dengan impor antar daerah). Data PDRB dalam publikasi ini serta publikasi-publikasi selanjutnya menggunakan tahun dasar 2010, serta sudah menerapkan konsep *System of National Accounts 2008* seperti yang direkomendasikan oleh *United Nations*.

Kepada seluruh anggota Tim Penyusun Publikasi ini yang telah memberikan kontribusinya dalam mewujudkan publikasi ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Demikian pula kepada instansi pemerintah dan lembaga/perusahaan swasta yang telah memberikan dukungan data bagi penyusunan publikasi ini diucapkan terima kasih. Semoga kerjasama yang telah terjalin selama ini dapat terus berlanjut serta dapat ditingkatkan di masa-masa mendatang.

Terakhir, disadari bahwa informasi yang disajikan dalam publikasi ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, setiap masukan yang bersifat konstruktif sangat dihargai demi penyempurnaan isi publikasi ini selanjutnya.

Akhirnya, semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Subang, April 2024

**Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Subang**



Muhammad Sholihin, S.E., M.M

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	3
1.2. Perubahan Tahun Dasar PDRB.....	8
BAB II. METODA ESTIMASI DAN SUMBER DATA	13
2.1. Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah tangga (PK-RT)	15
2.2 Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah tangga (PK-LNPRT)	17
2.3 Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P)	19
2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	22
2.5 Perubahan Inventori (PI)	25
2.6 Ekspor Impor	29
BAB III. TINJAUAN PEREKONOMIAN KABUPATEN SUBANG MENURUT PDRB PENGELUARAN TAHUN 2019-2023	31
3.1 PERKEMBANGAN PDRB PENGELUARAN	33
3.2 PERKEMBANGAN KOMPONEN PDRB PENGELUARAN	41
3.2.1 Konsumsi Akhir Rumah tangga	41
3.2.2 Konsumsi Akhir LNPRT	49
3.2.3 Konsumsi Akhir Pemerintah	49
3.2.4 Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)....	52

	Halaman
3.2.5 Perubahan Inventori	55
3.2.6 Perkembangan Impor Barang dan Jasa	57
BAB IV. PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB PENGELUARAN	59
KABUPATEN SUBANG	
4.1. PDRB (Nominal)	61
4.2. Proporsi Pengeluaran Konsumsi Akhir Terhadap PDRB	63
BAB V PENUTUP	65
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN	71

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Subang Tahun 2019-2023	35
Tabel 2.	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Subang Tahun 2019-2023	36
Tabel 3.	Distribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran, Kabupaten Subang Tahun 2019—2023	38
Tabel 4.	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2011 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Subang Tahun 2019—2023	39
Tabel 5.	Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Subang, Tahun 2019 – 2023	40
Tabel 6.	Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Subang, Tahun 2019—2023.....	42
Tabel 7.	Struktur Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Subang, Tahun 2019—2023	45
Tabel 8.	Pertumbuhan Riil Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Subang, Tahun 2019—2023	47
Tabel 9.	Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Subang, Tahun 2019—2023 ..	48
Tabel 10.	Perkembangan Pengeluaran Akhir Konsumsi LNPRT Kabupaten Subang, Tahun 2019—2023	49
Tabel 11.	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Subang, Tahun 2019 – 2023	51
Tabel 12.	Perkembangan dan Struktur PMTB Kabupaten Subang, Tahun 2019 – 2023	53
Tabel 13.	Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kabupaten Subang, Tahun 2019—2023	57

Tabel 14.	Perkembangan Ekspor Impor Barang dan Jasa, Kabupaten Subang 2019 – 2023	58
Tabel 15.	Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Subang 2019 - 2023	62
Tabel 16.	Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kabupaten Subang 2019-2023	63

<https://subangkab.bps.go.id>

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Perbandingan PDRB adh Berlaku dan adh Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Tahun 2019 – 2023	37
-----------	---	----

<https://subangkab.bps.go.id>

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Subang 2019 – 2023	73
Lampiran 2.	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran, Kabupaten Subang	74
Lampiran 3.	Disribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Subang	75
Lampiran 4.	Disribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran, Kabupaten Subang	76
Lampiran 5.	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Subang.....	77
Lampiran 6.	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran, Kabupaten Subang.....	78
Lampiran 7.	Indeks Perkembangan Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100) Menurut Pengeluaran, Subang.....	79
Lampiran 8.	Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100) Menurut Pengeluaran, Kabupaten Subang	80

<https://subangkab.bps.go.id>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto menurut pengeluaran (PDRB Pengeluaran) merupakan salah satu bentuk tampilan data ekonomi suatu wilayah, di samping bentuk tampilan lain seperti PDRB menurut lapangan usaha, Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi, dan Neraca Arus Dana. Di dalam sistem kerangka kerja (*frame work*) data ekonomi suatu wilayah, PDRB Pengeluaran merupakan ukuran dasar (*basic measure*) yang menggambarkan penggunaan atas barang dan jasa (*product*) yang dihasilkan melalui aktivitas produksi. Dalam konteks ini, PDRB Pengeluaran itu menggambarkan hasil “akhir” dari proses produksi yang berlangsung dalam batas-batas teritori suatu wilayah. Berbagai jenis barang dan jasa akhir tersebut akan digunakan untuk memenuhi permintaan akhir oleh pelaku ekonomi domestik maupun pelaku ekonomi dari luar wilayah bahkan dari luar negeri. Beberapa agregat penting dapat diturunkan dari PDRB Pengeluaran ini seperti variabel Pengeluaran Konsumsi Akhir, pembentukan modal tetap bruto atau investasi fisik, serta ekspor dan impor.

Penghitungan PDRB melalui pendekatan pengeluaran (*expenditure*) tidak terlepas dari penghitungan PDRB melalui pendekatan lapangan usaha (*production*). Sungguhpun demikian, PDRB Pengeluaran diestimasi secara independen dengan menggunakan data dasar yang relatif berbeda. PDRB Produksi menggambarkan aktivitas produksi, serta pendapatan yang diterima pemilik faktor produksi yang terlibat (balas jasa faktor produksi)¹. Sedangkan PDRB Pengeluaran menggambarkan aktivitas pengeluaran yang dilakukan para pelaku ekonomi untuk mendapatkan barang dan jasa yang diproduksi tersebut. Melalui PDRB Pengeluaran juga dapat dilihat keterkaitannya dengan penyediaan barang dan jasa yang berasal dari domestik maupun dari impor. Melalui hubungan ini terlihat titik

¹ Termasuk di dalamnya penyusutan dan pajak tidak langsung “neto” (pajak tidak langsung dikurangi subsidi)

keseimbangan makro antara sisi penyediaan (*supply side*) dan sisi permintaan (*demand side*) barang dan jasa.

Secara konsep² penghitungan PDRB dari sisi yang berbeda di atas dimaksudkan untuk: i) memastikan konsistensi dan kelengkapan di dalam membuat estimasi; ii) memberi manfaat lebih di dalam melakukan analisis; dan iii) mengontrol kelayakan hasil estimasi. Secara teoritis, kedua pendekatan tersebut akan menghasilkan nilai yang sama besar (*equivalent*). Namun karena pendekatan estimasi dan metoda pengukuran yang digunakan berbeda, maka akan muncul selisih statistik (*statistical discrepancy*).

Dengan demikian PDRB Pengeluaran menjelaskan besarnya nilai barang dan jasa (*output*) yang dihasilkan dalam wilayah domestik, yang digunakan sebagai konsumsi “akhir” oleh masyarakat. Secara spesifik, yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan barang dan jasa yang tidak dimaksudkan untuk diproses lebih lanjut (dikonsumsi habis). Penggunaan produk akhir tersebut diwujudkan dalam bentuk “permintaan akhir”. Permintaan akhir yang dimaksud terdiri dari komponen-komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumahtangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumahtangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Perubahan Inventori (PI), serta komponen Ekspor barang dan jasa.

Dalam menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi permintaan akhir masyarakat tersebut, tidak terlepas dari ketergantungan pada produk yang berasal dari dari luar wilayah atau luar negeri (impor). Berbagai barang dan jasa yang menjadi konsumsi akhir masyarakat di dalamnya akan terkandung produk impor. Sehingga dalam mengukur besarnya nilai tambah domestik (PDRB), komponen impor barang dan jasa harus dikeluarkan atau dikurangkan dari penghitungan konsumsi atau permintaan akhir. Tingginya permintaan tidak selalu diimbangi

² *Handbook of National Accounting. Accounting for Production: Sources and Methods (Series F no 30 United Nations)*

oleh penyediaan domestik, sehingga kondisi ini menjadi peluang bagi masuknya produk impor. Data empiris menunjukkan bahwa dari waktu ke waktu, perdagangan produk impor terus berkembang baik secara kuantitas, nilai, maupun ragamnya.

Secara konsep, PDRB Produksi (Y) sama besar dengan PDRB Pengeluaran (E), namun dalam kenyataannya tidaklah demikian. Selain berbeda dalam struktur atau komposisi, pendekatan pengukuran antar keduanya juga berbeda. Dalam penyajian data PDRB, perbedaan ini diletakkan pada sisi PDRB Pengeluaran. Unsur yang menyebabkan perbedaan tersebut antara lain adalah konsep dan basis pengukuran, metoda dan cakupan pengukuran, serta data dasar yang digunakan untuk estimasi. Melalui penjelasan ini para pengguna data PDRB tidak mempermasalahkan adanya perbedaan (*statistical discrepancy*) tersebut.

Penyusunan data **PDRB Pengeluaran** juga dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana “pendapatan” (Y) yang tercipta melalui proses produksi menjadi sumber pendapatan masyarakat³, yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir.

Dari sudut pandang lain, PDRB Pengeluaran juga menjelaskan penggunaan dari sebagian besar produk domestik bruto untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir, atau dengan istilah yang berbeda disebut sebagai “**output akhir (final output)**”. Mengkaitkan antara pendapatan dan pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa dari produk domestik maupun impor (termasuk untuk diekspor) merupakan bentuk analisis yang sederhana dari data PDRB. Keharusan memiliki jumlah yang sama pada kedua model pendekatan PDRB tersebut, secara simultan dapat ditunjukkan melalui model atau persamaan *Keynesian* sbb :

3. - Yang dimaksud adalah rumah tangga, pemerintah, lembaga non profit yang melayani rumah tangga serta sektor produksi (produsen) di wilayah domestik

- Disebut sebagai pendekatan “riil”

- Siklus ekonomi secara umum yang menjelaskan tentang hubungan antara balas jasa faktor produksi (pendapatan) dengan pengeluaran atas penggunaan berbagai produk barang dan jasa oleh faktor produksi tersebut

$$Y = C + GFCF + \Delta \text{ Inventori} + X - M$$

Y (<i>Income</i>)	= PDRB Produksi
C (<i>Consumption</i>)	= Konsumsi akhir
GFCF (<i>Gross Fixed Capital Formation</i>)	= Pembentukan Modal Tetap Bruto
Δ Inventori	= Perubahan Inventori
X	= Ekspor
M	= Impor

Persamaan di atas menunjukkan pendapatan atau nilai tambah bruto dari hasil penghitungan PDRB Produksi akan “identik” dengan PDRB Pengeluaran. Jika Y adalah pendapatan, C adalah konsumsi akhir, dan GFCF serta Δ Inventori merupakan bentuk investasi fisik, maka selisih antara ekspor dengan impor menggambarkan surplus atau defisit dari aktivitas perdagangan barang dan jasa antar wilayah, baik dengan wilayah lain ataupun dengan luar negeri.

Melalui pendekatan ini dapat diketahui perilaku masyarakat dalam menggunakan pendapatan, apakah hanya untuk tujuan konsumsi (akhir) atau juga untuk tujuan investasi (fisik). Selain itu juga dapat diketahui besarnya ketergantungan ekonomi wilayah (domestik) terhadap luar negeri dalam bentuk perdagangan internasional (*external transaction*). Selisih antara ekspor dan impor juga disebut sebagai “ekspor neto” .

Sebagaimana PDRB Produksi, dari PDRB Pengeluaran juga dapat diturunkan berbagai data agregat tentang perekonomian wilayah seperti nilai nominal, struktur atau distribusi pengeluaran konsumsi akhir, pertumbuhan “riil”, serta indeks harga implisit. Data yang dimaksud tersedia baik untuk masing-masing komponen PDRB Pengeluaran maupun untuk total perekonomian.

1.2 PERUBAHAN TAHUN DASAR PDRB

Mengapa Tahun Dasar PDRB Perlu Diubah?

Selama sepuluh tahun terakhir, banyak perubahan yang terjadi pada kondisi perekonomian global maupun lokal, yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Krisis finansial global yang terjadi tahun 2008, penerapan perdagangan bebas antara China-ASEAN (CAFTA), perubahan sistem pencatatan perdagangan internasional, serta semakin meluasnya jasa layanan pasar modal merupakan beberapa contoh perubahan yang perlu diantisipasi dalam mekanisme pencatatan data statistik nasional.

Satu bentuk implementasi dari *System of National Accounts (SNA)* adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB/PDRB. Di Indonesia kegiatan perubahan tahun dasar dari tahun 2000 ke 2010 dilakukan bersamaan dengan upaya mengimplementasi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam buku panduan SNA 2008. Kegiatan ini diawali dengan menyusun kerangka kerja dalam bentuk *Supply and Use Tables (SUT)* Indonesia untuk tahun data 2010. Dari kerangka SUT tersebut diperoleh nilai estimasi PDB dan komponen-komponennya. Selanjutnya nilai PDB maupun komponennya ini dijadikan sebagai acuan (*benchmark*) ketika BPS Provinsi maupun BPS Kabupaten/Kota menyusun PDRB-nya. Untuk itu, guna menjaga konsistensi dengan hasil penghitungan PDB, maka perubahan tahun dasar PDRB dilakukan secara simultan dengan perubahan tahun dasar PDB.

Apa yang Dimaksud dengan SNA 2008?

SNA 2008 merupakan rekomendasi internasional tentang tata cara pengukuran aktivitas ekonomi, yang telah sesuai dengan penghitungan konvensional berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi. Rekomendasi dinyatakan dalam sekumpulan konsep, definisi, cakupan, dan klasifikasi, serta aturan neraca yang disepakati secara internasional dalam mengukur indikator ekonomi makro (*account*) seperti PDB/PDRB.

SNA dirancang guna menyediakan informasi tentang aktivitas yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi, utamanya aktivitas produksi, konsumsi, dan aktivitas akumulasi aset fisik. SNA dapat dimanfaatkan antara lain untuk kepentingan analisis, perencanaan dan penetapan kebijakan ekonomi. Melalui kerangka SNA, fenomena suatu perekonomian wilayah dapat dijelaskan dan dipahami dengan lebih baik.

Apa Manfaat Perubahan Tahun Dasar?

Manfaat perubahan tahun dasar PDRB diantaranya adalah:

- a. Menginformasikan kondisi ekonomi terkini, seperti terjadinya perubahan struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- b. Meningkatkan kualitas PDRB;
- c. Menjadikan PDRB dapat diperbandingkan secara nasional.

Apa Implikasi Perubahan Tahun Dasar?

Perubahan tahun dasar PDRB antara lain berdampak pada:

- a. Meningkatkan nilai PDRB, yang pada gilirannya berpengaruh pada perubahan kelompok pendapatan (dari wilayah berpendapatan rendah menjadi menengah atau tinggi), serta pergeseran struktur ekonomi;
- b. Perubahan besaran indikator makro seperti rasio pajak, rasio hutang, rasio investasi dan tabungan, neraca perdagangan, serta struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- c. Perubahan input data untuk keperluan *modeling* dan *forecasting*.

Mengapa Tahun 2010 sebagai tahun dasar?

Terpilihnya tahun 2010 sebagai tahun dasar didasarkan atas beberapa alasan sbb:

- Perekonomian Indonesia pada tahun 2010 relatif stabil;
- Terjadinya perubahan struktur ekonomi Indonesia selama 10 (sepuluh) tahun terakhir, terutama di bidang informasi, teknologi dan transportasi.

Perubahan ini berpengaruh pada pola distribusi dan munculnya beberapa produk baru;

- Rekomendasi PBB tentang pergantian tahun dasar, yang harus dilakukan setiap 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun⁴;
- Adanya pembaharuan konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, sumber data, dan metodologi penghitungan sesuai rekomendasi SNA 2008;
- Tersedianya data dasar untuk meningkatkan kualitas PDRB seperti hasil Sensus Penduduk 2010 dan Indeks Harga Produsen (*Producers Price Index*);
- Tersedianya kerangka SUT Indonesia tahun 2010, yang menunjukkan keseimbangan antara produksi, konsumsi serta pendapatan yang tercipta dari aktivitas tersebut.

Implementasi SNA 2008 dalam PDRB tahun dasar 2010

Terdapat 118 revisi di SNA 2008 dari SNA sebelumnya, dan 44 diantaranya merupakan revisi yang utama. Beberapa revisi yang diadopsi dalam penghitungan PDB/PDRB tahun dasar 2010 antara lain adalah:

- Konsep dan Cakupan
 - a. Sumber daya hayati (*cultivated biological resources/CBR*). *CBR* merupakan nilai aset alam hasil budidaya manusia, yang diperlakukan sebagai bagian dari output pertanian dan PMTB. Contoh nilai tegakan padi, kelapa sawit dan karet yang belum dipanen, serta nilai sapi perah yang belum menghasilkan.
 - b. Sistem persenjataan (*military weapon systems/MWS*). *MWS* merupakan nilai pengeluaran pemerintah untuk pengadaan alat pertahanan dan keamanan, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri peralatan militer dan PMTB seperti pesawat tempur, kendaraan lapis baja, dan peluru kendali.

⁴ SNA1993, para 16.76: "constant price series should not be allowed to run for more than five, or at the most, ten years without rebasing"

- c. Penelitian dan pengembangan (*research and development/RnD*). *RnD* merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas penelitian dan pengembangan, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB seperti *RnD* tentang varietas padi, produk otomotif, dan riset pemasaran.
- d. Eksplorasi dan evaluasi mineral (*mineral exploration and evaluation/MEE*). *MEE* merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral, tanpa memperhitungkan apakah berhasil atau tidak menemukan cadangan tambang atau mineral. Biaya eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industri pertambangan dan PMTB.
- e. Bank Sentral (*Central Bank/CB*). Aktivitas Bank Indonesia yang terkait dengan penyediaan jasa kebijakan moneter dan pengawasan dipisahkan dari jasa intermediasi keuangan. Aktivitas tersebut digabungkan dengan aktivitas penyediaan jasa regulasi yang dihasilkan pemerintahan.
- f. Komputer software (*computer software and databases/CSD*). *CSD* merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunan *databases*, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB.
- g. Produk kekayaan intelektual (*entertainment, literary or artistic originals/ELA*). *ELA* merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunannya, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB.
- h. pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral, tanpa memperhitungkan apakah kegiatan tersebut berhasil ataupun tidak berhasil menemukan cadangan tambang atau mineral. Biaya eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industri pertambangan dan PMTB.

- Metodologi

Output jasa intermediasi keuangan. Output industri ini diestimasi dengan metoda FISIM (*Financial intermediation services indirectly measured / FISIM*). FISIM dihitung berdasarkan tingkat suku bunga simpanan (*deposits*), bunga pinjaman (*loans*), dan suku bunga referensi (*reference*). Metoda ini menggantikan metoda *Imputed Bank Services Charge (IBSC)*.

- Valuasi

Nilai tambah bruto lapangan usaha dinilai dengan harga dasar (*Basic Price*). Harga dasar merupakan harga keekonomian suatu barang atau jasa pada tingkat produsen, sebelum ada intervensi pemerintah dalam bentuk pajak dan subsidi atas produk.

- Klasifikasi

Klasifikasi yang digunakan adalah Internasional Standard Industrial Classification (ISIC rev.4) dan Central Product Classification (CPC rev.2). BPS mengadopsi kedua jenis klasifikasi tersebut menjadi KBLI 2009 dan KBKI 2010.

Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Pengeluaran Tahun Dasar 2000 dan 2010

PDRB Tahun Dasar 2000	PDRB Tahun Dasar 2010
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga
2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT
3. Pembentukan Modal Tetap Bruto	3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah
4. Perubahan Inventori	4. Pembentukan Modal Tetap Bruto
5. Ekspor	5. Perubahan Inventori
6. Impor	6. Ekspor
	7. Impor

<https://subang.kab.bps.go.id>

BAB II
METODA ESTIMASI DAN SUMBER DATA

2.1 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAHTANGGA (PK-RT)

i. Pendahuluan

Sektor rumahtangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan komponen konsumsi rumahtangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran⁵. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumahtangga juga berperan sebagai produsen serta penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lainnya.

ii. Konsep dan Definisi

Pengeluaran konsumsi akhir rumahtangga (PK-RT) merupakan pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumahtangga untuk tujuan konsumsi. Rumahtangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama utamanya kelompok makanan dan perumahan.

iii. Cakupan

PK-RT mencakup pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumahtangga residen, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu *region*. Jenis barang dan jasa tersebut diklasifikasikan menurut *Classifications of Individual Consumption by Purpose (COICOP)*, sbb:

1. Makanan dan minuman tidak beralkohol
2. Minuman beralkohol, tembakau dan narkotik
3. Pakaian dan alat kaki
4. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya
5. Furniture, perlengkapan rumahtangga dan pemeliharaan rutin

⁵ Untuk Kabupaten/Kota yang mempunyai hasil tambang/industri/perkebunan dan nilai eksportnya sangat tinggi, umumnya nilai konsumsi rumahtangganya relatif lebih rendah

6. Kesehatan
7. Angkutan
8. Komunikasi
9. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan
10. Pendidikan
11. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel
12. Barang dan jasa lainnya

Namun dalam publikasi ini, PK-RT hanya diklasifikasi ke dalam 7 COICOP, yaitu:

1. Makanan, Minuman, dan Rokok
2. Pakaian dan Alas Kaki
3. Perumahan, Perkakas, Perengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga
4. Kesehatan dan Pendidikan
5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya
6. Hotel dan Restoran
7. Lainnya

iv. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi komponen PK-RT bersumber dari :

- Survei Sosial Ekonomi Nasional/Daerah (Susenas/Suseda), BPS
- Survei Khusus Konsumsi Rumahtangga Triwulanan (SKKRT), BPS
- Sensus Penduduk 2010, BPS
- Data Sekunder (dari dalam maupun luar BPS)
- Indeks Harga Konsumen (IHK), BPS

v. Metoda Estimasi

Komponen PK-RT Tahunan diestimasi dengan metoda sbb:

1. Nilai pengeluaran konsumsi perkapita Susenas/Suseda (untuk PK-RT Tahunan)
2. Data poin 1 dikalikan dengan penduduk pertengahan tahun, dikalikan 12 (PKRT Tahunan)
3. Data poin 2 dikelompokkan menjadi 12 kelompok COICOP, dengan beberapa komoditas dikontrol secara tersendiri;
4. Terhadap data poin 3, dilakukan kontrol/koreksi dengan menggunakan data sekunder atau data/indikator suplai;
5. Diperoleh nilai PK-RT Tahunan atas dasar harga berlaku (atas dasar harga Berlaku) ;
6. Susun Indeks implisit PK-RT berdasarkan IHK Kota (provinsi/kota terdekat);
7. Nilai PK-RT atas dasar harga Konstan diperoleh dengan cara membagi hasil poin 5 dengan poin 6.

Catatan:

Komponen PK-RT Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan konsumsi rumahtangga triwulanan yang diperoleh dari hasil kegiatan SKKRT.

2.2 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LEMBAGA NON PROFIT YANG MELAYANI RUMAHTANGGA (PK-LNPRT)

i **Pendahuluan**

Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumahtangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri di dalam perekonomian suatu wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggota maupun bagi kelompok rumahtangga tertentu secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tak berarti secara ekonomi artinya harga yang ditawarkan di bawah tingkat harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

ii Konsep dan definisi

LNPRT merupakan bagian dari lembaga non profit (LNP). Untuk diketahui, sesuai dengan fungsinya LNP dapat dibedakan atas LNP yang melayani rumahtangga (LNPRT) dan LNP yang melayani bukan rumahtangga.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggota atau rumahtangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota yang dimaksud bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 jenis lembaga, yaitu: Organisasi kemasyarakatan, Organisasi sosial, Organisasi profesi, Perkumpulan sosial/kebudayaan/olahraga/hobi, Lembaga swadaya masyarakat, Lembaga keagamaan, dan Organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

iii. Cakupan

Nilai PK-LNPRT merupakan nilai output non-pasar yang dihasilkan oleh LNPRT. Nilai output non-pasar diestimasi berdasarkan nilai pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasional. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari :

- a. Konsumsi antara, contoh : pembelian alat tulis dan barang cetakan; pembayaran rekening listrik, air, telepon, teleks, faksimili; biaya rapat, seminar, perjamuan; biaya transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas; belanja barang dan jasa lainnya; sewa gedung, sewa perlengkapan kantor dll.
- b. Kompensasi tenaga kerja, contoh : upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lain
- c. Penyusutan
- d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN dll.

iv. Sumber Data

- a. Survei Khusus Lembaga Nonprofit yang melayani Rumahtangga (SK-LNP), BPS

- b. SK-LNP Triwulanan (SK-LNPT), BPS
- c. Hasil *up-dating* direktori LNPRT, BPS
- d. Indeks Harga Konsumen, BPS

v. Metoda Estimasi

Komponen PK-LNPRT Tahunan diestimasi dengan metoda sbb:

1. Nilai pengeluaran konsumsi per jenis lembaga dari hasil SK-LNP;
2. Hasil dari poin 1 dikalikan dengan banyaknya lembaga pada pertengahan tahun dari Direktori LNPRT;
3. Terhadap hasil poin 2 dilakukan kontrol/koreksi dengan menggunakan indikator kegiatan hasil SK-LNP seperti jumlah tenaga kerja, penerima layanan, berbagai even seperti munas, rakerda, dan penanganan bencana;
4. Diperoleh nilai PK-LNPRT tahunan atas dasar harga berlaku (atas dasar harga Berlaku);
5. Susun Indeks implisit PK-LNPRT berdasarkan IHK Kota (Provinsi/Kota terdekat);
6. Nilai PK-LNPRT atas dasar harga Konstan (ADHK) diperoleh dengan membagi hasil poin 4 dengan poin 5.

Catatan :

Komponen PK-LNPRT Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan pengeluaran konsumsi LNPRT triwulanan yang diperoleh dari hasil kegiatan SK-LNPT.

2.3 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH (PK-P)

i. Pendahuluan

Unit pemerintah merupakan unit institusi yang terbentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang legislatif, yudikatif, dan eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas teritori suatu wilayah atau

negara. Pemerintah juga berperan sebagai penyedia barang dan jasa bagi individu atau kelompok rumah tangga tertentu, pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lainnya, serta berfungsi untuk mendistribusikan pendapatan melalui aktivitas transfer. Dari sudut pandang lain, unit pemerintah terlibat dalam produksi non-pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah berperan sebagai konsumen maupun produsen barang dan jasa, serta sebagai regulator yang menetapkan kebijakan di bidang fiskal maupun moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah melakukan aktivitas produksi dan investasi.

ii. Konsep dan Definisi

Nilai PK-P merupakan besarnya nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh pemerintah untuk dikonsumsi oleh pemerintah itu sendiri. Nilai tersebut diestimasi dengan pendekatan pengeluaran, yakni sebesar nilai pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran kompensasi pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, serta nilai output dari unit Bank Indonesia. Nilai ini masih harus dikurangi nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan melalui unit produksi yang tak terpisahkan dari aktivitas pemerintahan secara keseluruhan. Aktivitas yang dimaksud mencakup aktivitas:

1. Memproduksi barang yang sejenis dengan barang yang diproduksi unit perusahaan seperti publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, dan pembibitan tanaman di kebun percobaan. Aktivitas menghasilkan barang-barang semacam itu bersifat insidental dan di luar fungsi utama dari unit pemerintah.
2. Memproduksi jasa, seperti penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam parktek, pemerintah akan memungut biaya, namun umumnya biaya yang

dikenakan tidak akan melebihi seluruh biaya yang dikeluarkan pemerintah. Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditi atau pendapatan jasa.

iii. Cakupan

Sektor pemerintah terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, pemerintah kabupaten/kota mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing.

PK-P kabupaten/kota mencakup: a). PK-P desa/kelurahan/nagari yang ada di wilayah kabupaten/kota; b). PK-P kabupaten/kota yang bersangkutan; c). PK-P pusat yang merupakan bagian dari PK-P kabupaten/kota.

iv. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi PK-P kabupaten/kota tahunan adalah:

- a. Data realisasi APBD Tahunan, Kementerian Keuangan dan Bappeda
- b. Statistik Keuangan Daerah, BPS
- c. Output Bank Indonesia, Bank Indonesia
- d. Gaji Pegawai Negeri Sipil, Kementerian Keuangan dan Bappeda
- e. Indeks Harga dan Indeks Upah, BPS
- f. Indeks perkembangan pengeluaran pemerintah daerah triwulanan, BPS

v. Metoda Estimasi

Komponen PK-P kabupaten/kota Tahunan diestimasi dengan menggunakan metoda:

PK-P atas dasar harga Berlaku = Output -
 Penjualan barang dan jasa +
 Social transfer in kind purchased market production +
 Output Bank Indonesia

Jenis Belanja	Deflator	Keterangan
Belanja Pegawai	Indeks Upah	Sama dengan Nasional
Belanja Barang	IHPB umum tanpa ekspor	Sama dengan Nasional
Penyusutan	Indeks Implisit PMTB	
Belanja Bansos	IHPB umum tanpa ekspor	Sama dengan Nasional
Penerimaan barang dan jasa	IHK umum	Prov atau Kab/Kota terdekat
Social Transfer in kind	IHK umum	Prov atau Kab/Kota terdekat
Output BI		Neraca Jasa

Output non pasar dihitung melalui pendekatan biaya operasional, seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja bantuan sosial dan belanja lain-lain.

Catatan :

1. Komponen PK-P Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan pengeluaran konsumsi pemerintah daerah triwulanan

PK-P atas dasar harga Konstan diestimasi dengan men-*deflate* PK-P atas dasar harga Berlaku dengan menggunakan deflator berikut:

2.4 PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)

i Pendahuluan

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor penentu di dalam perkembangan atau pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Dalam konteks PDRB, aktivitas investas yang dimaksud adalah investasi dalam bentuk fisik. Aktivitas

investasi akan tercermin melalui komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori (PI). Komponen PMTB terkait dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang terlibat dalam proses produksi. Aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal, yakni dalam bentuk bangunan dan konstruksi lainnya; mesin dan perlengkapan; kendaraan; tumbuhan dan ternak; serta barang modal lainnya.

ii Konsep dan definisi

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan barang modal yang ada pada unit produksi dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri, serta barang modal baru maupun barang modal bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer dan barter), serta pertumbuhan aset sumberdaya hayati yang dibudidaya (*Cultivated Biological Resources/CBR*). Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, serta sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Dalam hal pengurangan barang modal yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta mengalami penyusutan sepanjang usia pakai-nya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal karena digunakan dalam proses produksi secara normal selama periode tertentu.

iii Cakupan

PMTB mencakup :

1. Penambahan dikurangi pengurangan barang modal baik baru maupun bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal,

bangunan dan konstruksi lainnya, mesin & perlengkapan, alat transportasi, tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*);

2. Biaya alih kepemilikan atas aset non-finansial yang tidak diproduksi seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
3. Perbaikan besar barang modal, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakai-nya seperti *overhaul* mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi.

iv Sumber Data

- a. Output industri konstruksi, BPS
- b. Nilai impor 2 digit HS, BPS
- c. Indeks Produksi Industri Besar Sedang, BPS
- d. Laporan Keuangan Perusahaan, Data Sekunder dari luar BPS
- e. Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang, BPS
- f. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB), BPS
- g. Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalian (migas dan non-migas), BPS
- h. Publikasi Statistik Listrik, Gas & Air Minum, BPS
- i. Publikasi Statistik Konstruksi, BPS
- j. Data Eksplorasi Mineral, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- k. Statistik Peternakan, Ditjen Peternakan Kementerian Pertanian.

v Metoda estimasi

Komponen PMTB diestimasi dengan menggunakan metoda langsung ataupun metoda tidak langsung tergantung ketersediaan data di masing-masing daerah.

- ✓ Metoda Langsung:

PMTB atas dasar harga Berlaku (Domestik) = Barang Modal Domestik + TTM + Pajak atas Produk (PPN) + Biaya Instalasi

PMTB atas dasar harga Berlaku (Impor) = Barang Modal Impor + TTM + Bea Impor + Biaya Instalasi

PMTB atas dasar harga Konstan diperoleh dengan cara men-*deflate* PMTB atas dasar harga Berlaku dengan IHPB sbb:

$$PMTB_{ADHK} = \frac{PMTB_{ADHE}}{IHPB}$$

IHPB yang digunakan adalah IHPB Nasional (2010=100) sesuai jenis barang modal.

✓ Metoda Tidak Langsung:

Pendekatan Supply : PMTB atas dasar harga Berlaku = Total Supply Barang x Rasio PMTB

Pendekatan Ekstrapolasi : PMTB atas dasar harga Konstan (t) = PMTB atas dasar harga (t-1) x Indeks Produksi (t)

2.5 PERUBAHAN INVENTORI (PI)

i Pendahuluan

Dalam suatu perekonomian, inventori atau persediaan merupakan salah satu komponen penting yang dibutuhkan untuk kelangsungan suatu proses produksi, di samping tenaga kerja dan barang modal. Komponen tersebut menjadi bagian dari pembentukan modal bruto atau investasi fisik, yang terjadi di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Komponen inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong. Ketersediaan data tentang perubahan inventori

pada suatu periode akuntansi menjadi penting guna memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

ii Konsep dan definisi

Pengertian sederhana dari inventori adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang lainnya, yang mempunyai nilai ekonomi atau manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian tersebut adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh produsen.

Nilai perubahan inventori merupakan selisih antara nilai inventori di akhir periode dengan nilai inventori pada awal periode (akuntansi). Perubahan inventori menjelaskan perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna penambahan (bertanda positif) ataupun pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan dari proses produksi sehingga perlu dicadangkan, baik dalam bentuk bahan baku ataupun bahan penolong. Faktor ketidakpastian yang disebabkan oleh pengaruh dari faktor eksternal juga menjadi pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih disebabkan oleh unsur spekulasi, dengan harapan agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Sedangkan bagi pemerintah, pencadangan komoditas yang strategis dimaksudkan untuk menjaga stabilitas ekonomi, sosial dan politik. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas, maka beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, tepung terigu, minyak goreng dan gula pasir perlu dicadangkan oleh pemerintah. Namun bagi rumahtangga, pengadaan inventori barang lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsi.

iii Cakupan

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang sbb :

- a. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
- b. Inventori menurut jenis bahan baku & penolong (*material & supplies*), mencakup semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
- c. Barang jadi, mencakup barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
- d. Barang setengah jadi, yang mencakup barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai);
- e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang untuk tujuan dijual;
- f. Ternak untuk tujuan dipotong;
- g. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau digunakan sebagai bahan bakar atau persediaan; serta
- h. Persediaan pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

iv Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi komponen perubahan inventori adalah :

1. Laporan keuangan perusahaan hasil kegiatan survei atau *website* Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id);
2. Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/BUMD, Data Sekunder dari luar BPS
3. Data komoditas pertambangan, Statistik Pertambangan dan Penggalian BPS;

4. Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang, BPS;
5. Data komoditas perkebunan;
6. Indeks harga implisit PDRB industri terpilih;
7. Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih;
8. Data persediaan beras, Bulog; data semen, Asosiasi Semen Indonesia; data gula, Dewan Gula Indonesia ; dan data ternak, Ditjennak Kementan.

v **Metoda Estimasi**

Komponen Perubahan Inventori (PI) diestimasi dengan menggunakan metoda revaluasi atau metoda deflasi, tergantung jenis komoditasnya.

a. Metoda Revaluasi

Metoda ini digunakan untuk komoditas pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan dan pertambangan.

PI atas dasar harga Berlaku = Volume inventori (t) - Volume inventori (t-1) x Harga per unit

PI atas dasar harga Konstan = PI atas dasar harga Berlaku / IHPB

b. Metoda Deflasi

Metoda ini digunakan untuk komoditas industri pengolahan dan komoditas lainnya.

PI atas dasar harga Konstan = Inventori (t) atas dasar harga Berlaku/IHPB (t) - Inventori (t-1) atas dasar harga Berlaku/IHPB (t-1)

PI atas dasar harga Berlaku = PI atas dasar harga Konstan x IHPB rata-rata (t)

2.6 EKSPOR - IMPOR

i **Pendahuluan**

Aktivitas ekspor-impor dari dan ke suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintahan. Ragam barang dan jasa yang diproduksi maupun disparitas harganya menjadi faktor utama munculnya aktivitas tersebut. Wilayah yang tidak dapat memenuhi kebutuhan-nya sendiri berusaha untuk mendatangkan dari luar wilayah atau bahkan dari luar negeri. Di sisi lain, wilayah yang memproduksi barang dan jasa melebihi kebutuhan domestik-nya, terdorong untuk memperluas pasar ke luar wilayah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas berbagai barang dan jasa semakin meningkat. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus dan distribusi barang dan jasa. Kondisi ini semakin mendorong aktivitas ekspor-impor dari dan ke suatu wilayah.

ii **Konsep dan definisi**

Ekspor-impor didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (melalui aktivitas penjualan/ pembelian, barter, pemberian atau hibah) barang dan jasa antar residen wilayah tersebut dengan non-residen (yang berada di luar wilayah atau luar negeri).

iii **Cakupan**

Ekspor-Import ke dan dari suatu wilayah kabupaten/kota terdiri dari:

- a. Ekspor ke luar provinsi/kabupaten/kota
- b. Impor dari luar provinsi/kabupaten/kota.

Selisih antara ekspor dan impor didefinisikan sebagai Net Ekspor.

iv Sumber Data

Nilai ekspor-impor wilayah kabupaten/kota didasarkan pada penghitungan Net Ekspor. Namun sering kali untuk mengestimasi tidak ada data yang sesuai dengan konsep dan definisi yang ditentukan. Kondisi inilah yang menyebabkan Net Ekspor kabupaten/kota diperlakukan sebagai item penyeimbang (*residual*), yakni perbedaan antara PDRB menurut pengeluaran dengan PDRB menurut lapangan usaha. Selanjutnya dilakukan pemisahan Net Ekspor menjadi ekspor dan impor dengan menggunakan metoda tidak langsung.

***BAB III
TINJAUAN PEREKONOMIAN
KABUPATEN SUBANG
MENURUT PDRB PENGELUARAN
TAHUN 2019 -2023***

<https://subangkab.go.id>

Tujuan dari pembangunan adalah kesejahteraan masyarakat dan hal ini tercermin dalam berbagai kebijakan pembangunan nasional maupun kebijakan pembangunan daerah, baik propinsi maupun kota/kabupaten. Salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan ekonomi daerah, peningkatan kualitas pembangunan, mengoptimalkan potensi daerah serta menjaga stabilitas daerah. Dalam Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Subang Tahun 2019 - 2023, Pemerintah Kabupaten Subang berkomitmen untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Subang dengan menyelaraskan sektor-sektor ekonomi strategis sehingga tercipta stabilitas ekonomi, kesejahteraan masyarakat dan mengembangkan SDM yang potensial dan produktif. Pembahasan berikut akan memperjelas perkembangan perekonomian di Kabupaten Subang.

3.1. PERKEMBANGAN PDRB PENGELUARAN

Indikator perekonomian makro dijelaskan oleh PDRB baik dari sisi penawaran maupun dari sisi permintaan. Tinjauan dari sisi penawaran dijabarkan pada PDRB menurut lapangan usaha, sedangkan dari sisi permintaan dijabarkan oleh PDRB menurut pengeluaran. Pertumbuhan keduanya merupakan instrumen yang digunakan sebagai evaluasi terhadap keberhasilan program pembangunan ekonomi suatu Pemerintah Daerah. PDRB menurut lapangan usaha menjabarkan perekonomian dalam hal penciptaan nilai tambah atas produksi barang dan jasa secara agregat oleh seluruh lapangan usaha, sedangkan PDRB menurut pengeluaran menjabarkan bagaimana seluruh produk barang dan jasa tersebut digunakan.

Lebih spesifik PDRB menurut pengeluaran menjabarkan perilaku sektor pelaku ekonomi dalam melakukan pengeluaran konsumsi akhir, investasi dan perdagangan antar wilayah serta antar negara. Pengeluaran konsumsi akhir dilakukan oleh Rumah tangga, Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah tangga

(LNPR) serta Pemerintah. Konsumsi yang dilakukan oleh korporasi dalam rangka proses produksi disebut konsumsi antara dan bukan merupakan komponen PDRB menurut pengeluaran. Investasi dalam hal ini Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang dilakukan oleh seluruh sektor pelaku ekonomi yaitu Rumah tangga, LNPR, Pemerintah, Korporasi baik swasta maupun BUMN dan BUMD. Juga menggambarkan agregat perubahan inventori, serta perdagangan luar wilayah baik antar provinsi maupun antar negara.

Konsumsi akhir oleh rumah tangga menggambarkan kemampuan daya beli masyarakat yang pada akhirnya akan menjadi kekuatan tarikan permintaan dalam perekonomian. Investasi yang dijabarkan oleh besaran PMTB dan Perubahan Inventori, menggambarkan bagaimana kekuatan perekonomian Jawa Barat berupa kekayaan aset tetap. Daya saing produk domestik juga diperlihatkan oleh besarnya peranan nilai ekspor. Nilai impor merupakan pengurang dalam perekonomian karena bukan merupakan produk dalam wilayah.

Nominal PDRB atas dasar harga berlaku menurut pengeluaran menggambarkan penggunaan akhir seluruh sumber daya yang diciptakan oleh sumber daya ekonomi dalam wilayah Kabupaten Subang. Perekonomian Kabupaten Subang selama tahun 2019-2023 menunjukkan tanda peningkatan. Hal ini terlihat dari pertumbuhan ekonominya yang menunjukkan arah positif dan terus meningkat. Peningkatan ekonomi tersebut digambarkan melalui nilai PDRB ADHB maupun ADHK, serta pertumbuhan total. Secara total, PDRB Kabupaten Subang atas dasar harga berlaku (adhb) di periode 2019-2023 meningkat sebesar 21,82 persen, yakni dari 40.790,68 miliar Rupiah di tahun 2019 menjadi 49.692,22 miliar Rupiah pada tahun 2023.

**Tabel 1. PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran
Kabupaten Subang (miliar rupiah), 2019 – 2023**

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	30.020,85	29.571,80	30.363,43	33.104,43	35.645,44
2. Konsumsi LNPRT	320,46	314,11	323,78	346,06	389,53
3. Konsumsi Pemerintah	3.778,37	3.711,59	3.775,70	3.852,96	4.091,91
4. PMTB	10.959,04	10.103,63	11.033,64	12.029,78	13.742,63
5. Perubahan Inventori	1.521,76	635,04	-384,70	63,29	61,74
6. Ekspor	21.333,63	20.620,66	21.712,11	23.873,26	25.529,76
7. Dikurangi Impor	27.143,43	24.808,50	24.531,05	27.109,39	29.768,80
Total PDRB	40.790,68	40.148,32	42.292,91	46.160,40	49.692,22

*angka sementara **angka sangat sementara

Selain dinilai atas dasar harga (adh) Berlaku, PDRB menurut pengeluaran juga dinilai adh Konstan 2010 atau adh berbagai produk yang dinilai dengan harga pada tahun 2010. Melalui pendekatan penghitungan adh konstan, PDRB di masing-masing tahun dapat memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau secara kuantitas saja (tanpa ada pengaruh perubahan harga). PDRB komponen pengeluaran adh Konstan menggambarkan perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya berkaitan dengan peningkatan volume konsumsi akhir. Selama kurun waktu 2019–2023, gambaran tentang perkembangan ekonomi Kabupaten Subang berdasarkan PDRB adh Konstan dapat dilihat pada tabel 2.

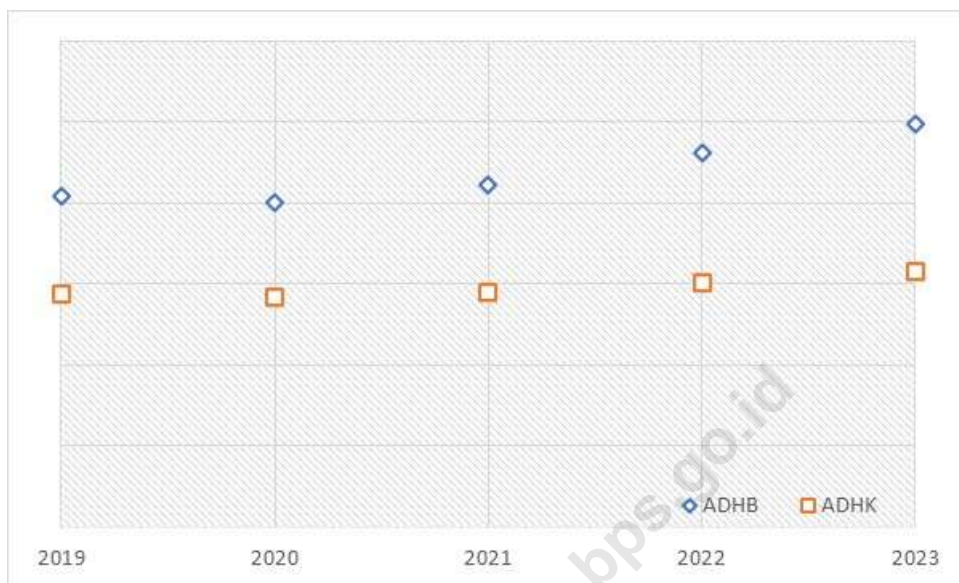
Tabel 2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Subang (miliar rupiah), 2019 - 2023

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	20.343,15	19.688,29	19.876,24	20.815,91	21.455,57
2. Konsumsi LNPRT	221,27	212,80	216,30	223,42	243,48
3. Konsumsi Pemerintah	2.303,13	2.228,82	2.236,47	2.195,46	2.264,09
4. PMTB	7.522,52	6.911,88	7.402,14	7.657,51	8.409,56
5. Perubahan Inventori	956,45	397,91	-224,82	36,71	34,25
6. Ekspor	15.566,91	15.489,73	15.783,21	16.408,80	17.284,90
7. Dikurangi Impor	18.240,53	16.585,10	16.328,63	17.135,23	18.086,87
Total PDRB	28.672,90	28.344,32	28.960,89	30.202,58	31.604,98

* angka sementara **angka sangat sementara

Jika dinilai atas dasar harga Konstan (adhk) tahun 2010, maka peningkatan ini jauh lebih rendah, yakni dari 28.672,90 miliar Rupiah (tahun 2019) menjadi 31.604,98 miliar Rupiah (tahun 2023), atau meningkat sebesar 10,23 persen. Nilai PDRB Kabupaten Subang adh Berlaku selama periode tahun 2019 sampai dengan 2023 menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh adanya perubahan harga dan juga perubahan volume.

Dari grafik 1, nampak bahwa pada umumnya nilai PDRB adh Berlaku selalu lebih besar dari nilai PDRB adh Konstan. Perbedaan tersebut disebabkan karena ada pengaruh perubahan harga dalam perhitungan PDRB adh Berlaku. Dalam PDRB adh Konstan pengaruh faktor harga telah ditiadakan. Sehingga selisih nilai antara adh Berlaku dengan adh Konstan merupakan nilai perubahan harga.



Gambar 1. Perbandingan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Subang, Tahun 2019 - 2023 (miliar rupiah)

Terbentuknya keseluruhan PDRB atau total PDRB merupakan kontribusi dari semua komponen pengeluarannya, yang terdiri dari konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT), konsumsi akhir LNPRT (PK-LNPRT), konsumsi akhir pemerintah (PK-P), pembentukan modal tetap bruto (PMTB), perubahan inventori, serta ekspor neto (E) atau ekspor dikurangi impor.

Berdasarkan tabel 3 berikut terlihat bahwa selama periode 2019 - 2023, produk yang dikonsumsi di wilayah domestik sebagian besar masih untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga (mencapai 70 persen). Ekspor juga mempunyai peran yang relatif besar di tahun 2023 mencapai 51,38 persen, ini berarti produk Kabupaten Subang cukup banyak bersaing di pasar internasional maupun pasar nasional. Namun demikian peranan impor masih mempunyai peran yang relatif besar di tahun 2023 mencapai 59,91 persen cukup besar di atas peranan ekspor. Hal ini memberikan gambaran bahwa permintaan domestik masih belum bisa sepenuhnya dipenuhi oleh produk domestik sehingga masih diperlukan impor baik luar negeri, luar provinsi, maupun luar kabupaten.

**Tabel 3. Distribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran
Kabupaten Subang (persen), 2019 – 2023**

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	73,60	73,66	71,79	71,72	71,73
2. Konsumsi LNPRT	0,79	0,78	0,77	0,75	0,78
3. Konsumsi Pemerintah	9,26	9,24	8,93	8,35	8,23
4. PMTB	26,87	25,17	26,09	26,06	27,66
5. Perubahan Inventori	3,73	1,58	-0,91	0,14	0,12
6. Ekspor	52,30	51,36	51,34	51,72	51,38
7. Dikurangi Impor	66,54	61,79	58,00	58,73	59,91
Total PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* angka sementara **angka sangat sementara

Di sisi lain, pengeluaran untuk PMTB juga mempunyai peran relatif besar dengan kontribusi sekitar 27,66 persen. Selama periode 2019 - 2023 peranan PMTB menggambarkan terjadinya fluktuatif terhadap aset tetap secara agregat dalam perekonomian Kabupaten Subang, dimana pada tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019, kemudian naik di tahun 2021 lalu turun di tahun 2022 dan naik kembali di tahun 2023. Perlu diketahui bahwa komponen PMTB erat kaitannya dengan investasi dan ekspansi usaha.

Dorongan dari pemerintah dalam bentuk investasi pembangunan infrastruktur tidak langsung menciptakan pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Subang pada tahun yang sama. Namun dampaknya akan dapat dinikmati pada tahun-tahun mendatang, sehingga diharapkan perekonomian Kabupaten Subang semakin menguat. Disamping itu pembangunan infrastruktur tidak hanya memberikan dampak secara ekonomi (profit) tapi juga memberikan manfaat (benefit) bagi pembangunan secara menyeluruh. Sehingga dalam analisa lebih lanjut pada beberapa tahun terakhir investasi di Kabupaten Subang terkesan

kurang efisien, namun di masa yang akan datang dapat terlihat profit dan benefit dari investasi di masa sekarang bagi perekonomian masa mendatang.

Komponen konsumsi akhir pemerintah peranannya berada dibawah 10 persen, pada tahun 2023 sebesar 8,23 persen. Hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam menyerap produk domestik tidak terlalu besar. Di sisi lain, perdagangan internasional dan antar provinsi yang direpresentasikan oleh transaksi ekspor dan impor, menunjukkan bahwa pada tahun 2019-2023 nilai ekspor lebih rendah dari nilai impor yang menunjukkan dalam kondisi “defisit”.

Tabel 4. Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Subang (persen), 2019 – 2023

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	3,95	-3,22	0,95	4,73	3,07
2. Konsumsi LNPR	2,79	-3,83	1,65	3,29	8,98
3. Konsumsi Pemerintah	3,00	-3,23	0,34	-1,83	3,13
4. PMTB	2,89	-8,12	7,09	3,45	9,82
5. Perubahan Inventori	-0,15	-58,40	-156,50	-116,33	-6,71
6. Ekspor	2,94	-0,50	1,89	3,96	5,34
7. Dikurangi Impor	1,31	-9,08	-1,55	4,94	5,55
Total PDRB	4,61	-1,15	2,18	4,29	4,64

* angka sementara **angka sangat sementara

Agregat makro lain yang dapat diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau lebih dikenal dengan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), yang menggambarkan kinerja pembangunan di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Subang dari tahun 2019 - 2023 secara rata-rata mencapai 2,91 persen, dengan masing-masing pertumbuhan sebesar 4,61 persen (2019); -1,15 persen (2020); 2,18 persen (2021); 4,29 persen (2022); dan 4,64 persen (2023). Kejadian luar biasa yang terjadi di tahun 2020, menyebabkan perekonomian Kab Subang mencapai pertumbuhan yang minus. Produksi barang

dan jasa berkurang drastis diakibatkan permintaan yang banyak berkurang, bahan baku sulit diperoleh, dan larangan ekspor impor. Sehingga banyak buruh pabrik yang di PHK. Dan di tahun 2023 perekonomian kembali tumbuh sebagai dampak membaiknya aktivitas produksi barang dan jasa.

Tabel 5. Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Subang (persen), 2019 – 2023

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	147,57	150,20	152,76	159,03	166,14
2. Konsumsi LNPRT	144,83	147,61	149,69	154,89	159,99
3. Konsumsi Pemerintah	164,05	166,53	168,82	175,50	180,73
4. PMTB	145,68	146,18	149,06	157,10	163,42
5. Perubahan Inventori	159,10	159,59	171,11	172,39	180,27
6. Ekspor	137,04	133,12	137,56	145,49	147,70
7. Dikurangi Impor	148,81	149,58	150,23	158,21	164,59
Total PDRB	142,26	141,65	146,03	152,84	157,23

* angka sementara

**angka sangat sementara

Sementara itu, indeks implisit (indeks perkembangan) PDRB yang menggambarkan tingkat perubahan harga yang terjadi pada sisi konsumen, baik konsumen akhir (rumah tangga, LNPRT, dan pemerintahan) maupun konsumen lainnya (perusahaan dan luar negeri) juga menunjukkan peningkatan. Sedangkan perubahan indeks implisit secara total merupakan perubahan secara umum atau menurut berbagai kegiatan ekonomi.

Indeks implisit pada konsumsi rumahtangga berbeda dengan besaran Indeks Harga Konsumen (IHK). Perbedaan ini karena cakupan komoditas di wilayah dimana indeks implisit mencakup semua komoditas yang dikonsumsi oleh rumahtangga di perkotaan maupun pedesaan, sedangkan IHK hanya mencakup sebagian komoditas dan rumahtangga di wilayah perkotaan saja.

3.2 PERKEMBANGAN KOMPONEN PDRB PENGELUARAN

Perubahan struktur perekonomian suatu wilayah sebagai akibat dari upaya pembangunan ekonomi yang dilaksanakan pada periode tertentu, tidak terlepas dari perilaku masing-masing komponen pengguna akhir. Setiap komponen mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuan akhir penggunaan barang dan jasa. Data empiris menunjukkan bahwa sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia pada periode tertentu digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir oleh rumahtangga, LNPRT dan pemerintah, sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori. Berikut perilaku masing-masing komponen PDRB pengeluaran Kabupaten Subang untuk periode 2019 – 2023.

3.2.1. Konsumsi Akhir Rumahtangga

Peranan terbesar penggunaan produksi barang dan jasa di wilayah Kabupaten Subang adalah untuk konsumsi akhir rumahtangga. Oleh karena itu analisis mengenai pengeluaran konsumsi akhir rumahtangga dalam ekonomi makro merupakan hal yang sangat penting. Konsumsi rumahtangga sangat dipengaruhi oleh pendapatan yang diterima, semakin besar pendapatan yang diterima oleh rumahtangga maka akan semakin besar pula nilai konsumsinya. Rumahtangga sebagai pemilik faktor produksi memperoleh pendapatannya dari kegiatan ekonomi yang dilakukannya, sehingga saat kondisi perekonomian meningkat maka pendapatan juga akan meningkat. Hal inilah yang mempengaruhi besaran fluktuasi kegiatan ekonomi suatu negara dari waktu ke waktu. Permintaan akhir secara keseluruhan juga dapat memberikan dampak tarikan terhadap aktivitas ekonomi, tingginya permintaan terhadap barang dan jasa akan diikuti oleh peningkatan produksi. Data berikut menunjukkan di mana sebagian besar produk domestik dan produk impor digunakan untuk memenuhi konsumsi akhir rumah tangga.

Tabel 6. Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Subang, 2019 – 2023

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga					
a. ADHB (<i>Miliar Rp</i>)	30.020,85	29.571,80	30.363,43	33.104,43	35.645,44
b. ADHK 2010 (<i>Miliar Rp</i>)	20.343,15	19.688,29	19.876,24	20.815,91	21.455,57
Proporsi terhadap PDRB (%ADHB)	73,60	73,66	71,79	71,72	71,73
Rata-rata konsumsi per-kapita/ tahun (<i>Ribu Rp</i>)					
a. ADHB	25.983	25.209	26.095	28.223	30.120
b. ADHK 2010	18.264	17.797	17.869	18.466	19.157
Pertumbuhan (persen)					
a. Konsumsi RT adh Konstan	3,95	-3,22	0,95	4,73	3,07
b. Perkapita	4,55	-2,56	0,40	3,34	3,74

* angka sementara **angka sangat sementara

Data pada tabel 6 menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2019 - 2023 konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan signifikan baik dalam nominal (adh Berlaku) maupun riil (adh Konstan), sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk. Kenaikan jumlah penduduk mendorong terjadinya kenaikan nilai konsumsi rumah tangga, yang pada gilirannya akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Bertambahnya jumlah penduduk berpendapatan kelas menengah (*middle class*) menyebabkan terjadinya perbaikan serta merubah perilaku dan kebiasaan konsumsi penduduk secara agregat. Melimpahnya penawaran dan persediaan berbagai jenis barang dan jasa di pasar domestik (termasuk yang berasal dari impor) turut menjadi pemicu meningkatnya belanja untuk konsumsi, termasuk konsumsi rumah tangga. Demikian halnya dukungan dari lembaga keuangan dengan berbagai fasilitas dan penawaran yang semakin mempermudah rumah tangga dalam hal pembiayaan konsumsi. Semakin majunya

teknologi informatika dan perkembangan media sosial yang tidak terbandung juga mempengaruhi standar konsumsi dan gaya hidup masyarakat.

Secara umum, konsumsi rumah tangga terus meningkat dari tahun ke tahun, baik menurut *adh Berlaku* maupun *adh Konstan 2010*. Porsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap PDRB pada periode tahun 2019 - 2023 cukup berfluktuatif. Titik tertinggi terjadi pada tahun 2020 yaitu 73,66 persen dan titik terendah terjadi pada tahun 2023 yaitu 71,73 persen. Konsumsi rumah tangga per tahun menggambarkan besaran dana yang dihabiskan setiap rumah tangga untuk membiayai konsumsi anggota rumahtangganya baik dalam bentuk makanan maupun bukan makanan (sandang, perumahan, pendidikan, dsb) selama periode 2019 - 2023. Pengeluaran ini menurun dari 30.020,85 miliar rupiah (2019) menjadi 29.571,80 miliar rupiah (2020); kemudian naik menjadi 30.363,43 miliar rupiah (2021), pada tahun 2022 meningkat kembali menjadi sebesar 33.104,43 miliar rupiah, dan pada tahun 2023 terus meningkat menjadi 35.645,44 miliar rupiah. Meningkatnya nilai konsumsi per rumah tangga sejalan dengan semakin bervariasinya jenis barang dan volume yang dikonsumsi terutama konsumsi non makanan. Sedangkan pada tahun 2020, konsumsi rumah tangga menurun seiring adanya fenomena pandemi covid-19.

Turunnya konsumsi per rumah tangga ini merupakan salah satu dampak yang paling terasa dengan adanya pandemic covid-19. Aktivitas produksi industri menurun, menyebabkan biaya produksi mereka naik, sehingga agar mengurangi biaya produksi bagi industri. Mereka melakukan PHK massal sampai waktu yang tidak diketahui seiring tidak ada yang mengetahui pandemi ini akan berakhir kapan. Dampak PHK massal ini, terjadi pengangguran yang meningkat drastis. Rumah tangga yang terdampak PHK, akan mengurangi konsumsi rumah tangga sampai mereka mendapatkan pekerjaannya kembali. Sehingga disini terjadi penurunan daya beli masyarakat. Hal ini dapat diamati dari laju pertumbuhan rata-rata konsumsi per rumah tangga yang minus di tahun 2020.

Rata-rata konsumsi per-kapita secara nominal sebesar 25.983,00 ribu rupiah pada tahun 2019, menurun mencapai 25.209,00 ribu rupiah pada tahun 2020. Dan

naik di tahun 2021 mencapai 26.095,00 ribu rupiah, kemudian naik kembali ke 28.223,00 ribu rupiah di tahun 2022 dan terus naik di tahun 2023 menjadi 30.120,00 ribu rupiah. Pergerakan nilai rata-rata konsumsi perkapita ini secara otomatis akan berpengaruh terhadap perubahan struktur konsumsi rumah tangga.

Secara total, pertumbuhan konsumsi rumah tangga adh Konstan sebesar 3,95 persen pada tahun 2019. Selanjutnya pada tahun 2020 konsumsi rumah tangga minus ke titik 3,22 persen. Pada tahun 2021 konsumsi rumahtangga meningkat ke 0,95 persen, kemudian naik di tahun 2022 mencapai 4,73 persen, dan di tahun 2023 konsumsi rumah tangga menurun mencapai 3,07 persen. Konsumsi rumahtangga perkapita di tahun 2019 sebesar 4,55 persen, selanjutnya pada tahun 2020 menjadi minus 2,56 persen. Pada tahun 2021 konsumsi rumahtangga perkapita meningkat mencapai 0,40 persen. Pada tahun 2022 konsumsi rumahtangga perkapita terus meningkat mencapai 3,34 persen dan pada tahun 2023 mencapai 3,74 persen. Melambatnya pertumbuhan konsumsi rumahtangga tidak serta merta karena daya beli masyarakat yang menurun, tetapi bisa juga karena perubahan perilaku konsumsi masyarakat yang berubah, menjadi perilaku investasi atau menabung. Nampak bahwa peningkatan keseluruhan konsumsi rumah tangga secara “riil” masih lebih tinggi dari peningkatan jumlah penduduk yang umumnya berada di bawah 2 (dua) persen. Hal ini mengindikasikan terjadi perubahan tingkat kemakmuran masyarakat, meskipun tidak dapat dijelaskan lebih jauh melalui perangkat data agregat PDRB ini. Seiring membaiknya pemulihan perekonomian, maka di tahun 2021 konsumsi rumahtangga tumbuh walaupun masih minus diangka 2,56 persen. Dan seiring membaiknya perekonomian, konsumsi rumahtangga meningkat mencapai 0,40 persen.

**Tabel 7. Struktur Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga
Kabupaten Subang (persen), 2019 – 2023**

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok selain restoran	38,65	40,02	40,62	40,97	41,00
b. Pakaian dan Alas Kaki	5,22	5,17	5,10	4,95	4,91
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	11,56	11,78	11,49	11,24	10,74
d. Kesehatan & Pendidikan	4,55	4,79	4,89	4,75	4,53
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	27,78	25,64	25,34	25,70	26,81
f. Hotel & Restoran	1,27	1,25	1,24	1,24	1,26
g. Lainnya	10,98	11,35	11,32	11,16	10,75
Total Konsumsi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

*angka sementara **angka sangat sementara

Tabel 7 menggambarkan struktur pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga, terlihat bahwa secara rata-rata dari tahun 2019 - 2023, nampak pada struktur konsumsi akhir rumah tangga Kabupaten Subang, didominasi oleh konsumsi bukan makanan dibandingkan konsumsi makanan. Proporsi pengeluaran untuk makanan setiap tahun cenderung masih berada pada kisaran yang sama. Namun demikian cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yaitu dari 38,65 persen (2019) menjadi 40,02 persen (2020); 40,62 persen (2021); 40,97 persen (2022) serta 41,00 persen (2023). Adapun sebaliknya proporsi non makanan terus mengalami penurunan yaitu dari sebesar 61,35 persen (2019); 59,98 persen (2020); 59,38 persen (2021); 59,03 persen (2022); menjadi 59,00 persen pada tahun 2023. Konsumsi makanan, minuman dan rokok tidak termasuk konsumsi makanan jadi dalam bentuk sajian, misalnya makanan jadi di restoran, warung makan dan sejenisnya. Makanan jadi dalam bentuk sajian masuk ke dalam kelompok konsumsi hotel dan restoran.

Peningkatan peranan konsumsi makanan, minuman dan tembakau selama lima tahun terakhir menggambarkan bahwa pola konsumsi masyarakat Kabupaten Subang memiliki kecenderungan kembali kepada prioritas pemenuhan kebutuhan primer. Dalam kondisi laju pertumbuhan ekonomi yang cenderung semakin melambat maka akan mempengaruhi tingkat pendapatan masyarakat, hal tersebut menyebabkan rumah tangga melakukan beberapa pilihan dalam melakukan konsumsi. Seiring dengan perlambatan tingkat pendapatan maka pola konsumsi cenderung kembali kepada pemenuhan kebutuhan primer. Proporsi konsumsi di atas, menunjukkan adanya tarik menarik antara kebutuhan rumah tangga atas makanan dan non makanan yang masih cukup kuat. Seiring dengan pengeluaran untuk kebutuhan non-makanan menjadi semakin penting sebagai akibat dari perubahan dan pengaruh tatanan ekonomi sosial dalam masyarakat. Pengeluaran tersebut di antaranya meliputi biaya untuk pendidikan, pembelian alat dan perlengkapan elektronik, pembelian alat transportasi, jasa komunikasi, jasa transportasi, jasa kesehatan, perjalanan wisata, restoran, sewa bangunan tempat tinggal, jasa hiburan dan sebagainya. Dalam konsep System of National Account 2008 (SNA 2008) komoditi makanan jadi produk penyedia makanan dan minuman (restoran) termasuk dalam konsumsi non makanan.

Dimasa pandemi pengeluaran yang meliputi biaya untuk barang dan jasa kesehatan menjadi sangat penting. Perubahan perilaku konsumsi masyarakat terutama di awal masa pandemi mengalami *panic buying*, kondisi yang tidak dapat diprediksi menyebabkan masyarakat melakukan belanja besar-besaran terhadap kebutuhan barang kesehatan seperti masker, vitamin, hand sanitizer dan sembako. Sedangkan kebutuhan terkait biaya pendidikan dan kebutuhan energi rumah tangga cenderung tetap. Permintaan yang cukup tinggi juga terjadi pada informasi dan komunikasi sebagai akibat kebijakan *work from home* dan *school from home*. Pembelian alat dan perlengkapan elektronik, pembelian alat transportasi, jasa transportasi, perjalanan wisata mengalami penurunan yang tajam.

Tabel 8. Pertumbuhan Riil Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Subang (persen), 2019 – 2023

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok selain restoran	5,48	0,43	2,09	5,10	2,47
b. Pakaian dan Alas Kaki	3,60	-5,49	0,23	3,57	4,10
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	2,06	-0,70	-0,78	4,15	0,99
d. Kesehatan & Pendidikan	4,14	1,35	3,24	2,96	0,05
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	3,59	-9,05	0,48	6,14	5,93
f. Hotel & Restoran	4,54	-3,50	0,61	5,12	5,89
g. Lainnya	2,62	-1,21	0,02	1,92	0,14

* angka sementara **angka sangat sementara

Dilihat dari pertumbuhan “riil” nya, pengeluaran rumah tangga untuk kelompok makanan menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada periode tahun 2019-2023 pertumbuhan konsumsi makanan, minuman dan rokok cenderung fluktuatif yaitu 5,48 persen (2019); 0,43 persen (2020); 2,09 persen (2021); meningkat mencapai 5,10 persen (2022); lalu mengalami penurunan kembali menjadi 2,47 persen (2023). Pertumbuhan konsumsi pakaian dan alas kaki selama periode 2019-2023 cenderung fluktuatif, pada tahun 2019 sebesar 3,60 persen lalu terkoreksi minus ke angka 5,49 persen di tahun 2020. Kemudian di tahun 2021 meningkat di angka 0,23 persen. Selanjutnya terus meningkat mencapai 3,57 persen di tahun 2022 dan mencapai 4,10 persen di tahun 2023. Pola yang hampir sama juga terjadi pada komoditi kesehatan dan pendidikan. Pengeluaran untuk pakaian dan alas kaki; perumahan, perkakas, perlengkapan dan penyelenggaraan rumah tangga; transportasi, komunikasi, rekreasi dan budaya; komoditi hotel dan restoran mengalami koreksi pertumbuhan yang di tahun 2020 kemudian mengalami percepatan di tahun 2021 hingga tahun 2023.

Pertumbuhan “riil” ini menunjukkan adanya perubahan konsumsi rumah tangga dalam bentuk kuantum (volume) dari waktu ke waktu. Informasi ini

menunjukkan terjadinya peningkatan kemakmuran masyarakat, meskipun mungkin hanya dapat dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu. Kecenderungan peningkatan konsumsi komoditi hotel dan restoran sejalan dengan fenomena pariwisata yang semakin marak. Kekuatan sosial media dalam menyebarkan informasi trend lokasi wisata mempengaruhi berubahnya pola konsumsi masyarakat ke arah kebutuhan “leisure” daripada kebutuhan fisik. Hal tersebut tergambar dari pola pertumbuhan konsumsi rumahtangga yang bersifat pemenuhan kebutuhan fisik cenderung melambat sedangkan kebutuhan yang bersifat “leisure” cenderung meningkat.

Sementara itu, tingkat perubahan harga yang secara implisit disajikan dalam Tabel 9, menunjukkan peningkatan setiap tahunnya untuk masing-masing kelompok pengeluaran konsumsi rumah tangga. Perubahan tersebut mencakup perubahan harga pada seluruh barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat. Rincian peningkatan harga pada kelompok makanan sebesar 2,69 persen (2019); 1,56 persen (2020); 2,08 persen (2021); 4,64 persen (2022) dan 5,16 persen (2023).

Tabel 9. Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Subang (persen), 2019 – 2023

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok selain restoran	2,69	1,56	2,08	4,64	5,16
b. Pakaian dan Alas Kaki	5,28	3,23	1,10	2,01	2,71
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	1,78	1,07	0,91	2,39	1,96
d. Kesehatan & Pendidikan	2,87	2,43	1,47	2,80	2,64
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	0,81	-0,03	0,99	4,21	6,03
f. Hotel & Restoran	1,18	0,89	1,18	3,62	3,26
g. Lainnya	2,88	3,06	2,45	5,43	3,58

* angka sementara **angka sangat sementara

3.2.2. Konsumsi Akhir LNPRT

Konsumsi akhir LNPRT peranannya dalam PDRB menurut pengeluaran sangat minor dibandingkan dengan komponen pengeluaran lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa peranan institusi ini dalam perekonomian suatu wilayah semestinya dapat lebih ditingkatkan lagi. Data berikut menunjukkan hal tersebut, dimana hal tersebut dapat dilihat dari proporsinya terhadap PDRB yang minor.

Nilai konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani rumah tangga (LNPRT) selalu meningkat, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Institusi ini merupakan lembaga non pemerintah yang dibiayai secara mandiri oleh masyarakat. Dalam pembahasan global dikenal dengan istilah *civil society*. Selama periode 2019 - 2023 peranan konsumsi akhir LNPRT kurang dari 1 (satu) persen yaitu 0,79 pada tahun 2019, kemudian menurun di tahun 2020 menjadi 0,78 persen, menurun menjadi 0,77 persen di tahun 2021, dan kembali menurun di tahun 2022 yang mencapai 0,75 persen. Kemudian angka ini mengalami kenaikan di tahun 2023 menjadi 0,78 persen.

**Tabel 10. Perkembangan Penggunaan Konsumsi LNPRT
Kabupaten Subang, 2019 – 2023**

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi LNPRT					
a. ADHB (Miliar Rp)	320,46	314,11	323,78	346,06	389,53
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	221,27	212,80	216,30	223,42	243,48
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	0,79	0,78	0,77	0,75	0,78

* angka sementara **angka sangat sementara

3.2.3. Konsumsi Akhir Pemerintah

Pemerintah merupakan salah satu institusi yang memiliki peran dalam perekonomian wilayah, baik sebagai pencipta nilai tambah maupun sebagai yang

melakukan konsumsi. Peranan pemerintah dalam melakukan konsumsi diantaranya adalah untuk membiayai kebutuhan barang dan jasa dalam menjalankan pemerintahan. Termasuk di dalamnya adalah biaya untuk pegawai, belanja bantuan sosial serta penyusutan barang modal. Konsumsi pemerintah sama dengan nilai output untuk komoditi non pasar. Artinya adalah biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk melayani masyarakat. Selain nilai output pemerintah non pasar, ada juga output pemerintah dengan harga pasar. Output pasar tersebut diantaranya adalah retribusi dan penerimaan lain-lain yang sah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berupa penerimaan dari fasilitas sosial dan fasilitas umum serta pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.

Konsumsi akhir pemerintah bersama dengan pengeluaran akhir rumah tangga dan LNPRT merupakan jumlah dari konsumsi akhir dalam suatu perekonomian suatu wilayah. Peranan konsumsi pemerintah dalam perekonomian Kabupaten Subang serta bagaimana perkembangannya akan dijelaskan dalam uraian dibawah ini.

Secara total, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah menunjukkan peningkatan, baik untuk *adh Berlaku* maupun *adh Konstan 2010*. Pada tahun 2019 total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah *adh Berlaku* sebesar 3.778,37 miliar rupiah, kemudian meningkat terus hingga pada tahun 2023 nilainya mencapai 4.091,91 miliar rupiah. Demikian halnya dengan konsumsi pemerintah *adh Konstan 2010*, yang juga mengalami peningkatan pada masing-masing tahun. Hal ini mengindikasikan, bahwa secara riil telah terjadi kenaikan pengeluaran pemerintah dari sisi kuantitas.

Menarik untuk dicermati lebih lanjut bahwa proporsi pengeluaran akhir pemerintah terhadap PDRB juga mengalami penurunan, pada tahun 2019 peranannya sebesar 9,26 persen, menurun peranannya sampai dengan 8,23 persen pada tahun 2023.

**Tabel 11. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah
Kabupaten Subang, 2019 - 2023**

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Pemerintah					
a. ADHB (Miliar Rp)	3.778,37	3.711,59	3.775,70	3.852,96	4.091,91
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	2.303,13	2.228,82	2.236,47	2.195,46	2.264,09
Proporsi terhadap PDRB (%ADHB)	9,26	9,24	8,93	8,35	8,23
Konsumsi Pemerintah perkapita (Ribu Rp)					
a. ADHB	2.406,72	2.330,51	2.347,20	2.371,95	2.519,05
b. ADHK 2010	1.467,03	1.399,48	1.390,33	1.351,56	1.393,81
Pertumbuhan (persen)					
a. Total konsumsi Pemerintah	3,00	-3,23	0,34	-1,83	3,13
b. Konsumsi Perkapita	3,59	-4,60	-0,65	-2,79	3,13
Jumlah penduduk (000 orang)	1.569,92 ¹	1.592,61 ²	1.620,70 ²	1.635,56 ³	1.649,82 ³
Pertumbuhan Jumlah Penduduk (persen)	0,58	1,44	1,76	0,92	0,87

Catatan :

* angka sementara

**angka sangat sementara

¹Hasil Proyeksi Penduduk SUPAS 2015

²Hasil Proyeksi Penduduk Interim

³Hasil Proyeksi SP2020

Dalam prakteknya, pengeluaran pemerintah seringkali dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat (publik). Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk, baik langsung maupun tidak langsung. Peningkatan pelayanan pemerintah provinsi kepada masyarakat dapat diamati dari peningkatan konsumsi pemerintah per-kapita dimana selama periode 2019 - 2023 terjadi peningkatan pada rata-rata konsumsi perkapita. Konsumsi pemerintah per-kapita adh Berlaku pada tahun 2019 sebesar 2.406,72 ribu rupiah, dan pada tahun 2023 meningkat mencapai 2.519,05 ribu rupiah (lihat tabel 11).

Rata-rata konsumsi pemerintah per-kapita adh Konstan (2010) juga menunjukkan adanya penurunan setiap tahunnya (lihat tabel 11). Hal tersebut dapat dilihat dari laju pertumbuhannya pada tahun 2019 sebesar 3,59 persen, kemudian tahun 2020 pertumbuhan minus menjadi -4,60 persen, di tahun 2021 menjadi minus -0,65 persen dan di tahun 2022 minus -2,79 persen. Kemudian di tahun 2023 laju pertumbuhannya mengalami kenaikan menjadi 3,13 persen.

Gambaran tentang konsumsi akhir pemerintah secara “riil” ini menunjukkan peningkatan baik secara keseluruhan maupun rata-rata (per penduduk maupun per pegawai pemerintah). Parameter ini adalah pendekatan untuk mengukur pemerataan kesempatan masyarakat atas pengeluaran sumber daya finansial oleh pemerintah.

3.2.4. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Investasi riil diukur dalam neraca nasional sebagai *Gross Domestic Investment* (GDI). Definisi *Gross Domestic Investment* menurut World Bank (2001), adalah merupakan pengeluaran penambahan aset tetap ekonomi ditambah perubahan bersih pada tingkat persediaan. Penambahan aset tetap termasuk perbaikan lahan (pagar, parit, saluran air dan sebagainya) pembelian pabrik, mesin, dan peralatan dan konstruksi bangunan, jalan, kereta api dan sejenisnya termasuk bangunan komersial dan industri, kantor, sekolah, rumah sakit dan swasta tempat tinggal. Sementara aktivitas penambahan dan pengurangan barang modal terjadi pada kurun waktu tertentu.

Perkembangan nilai investasi fisik Kabupaten Subang tahun 2019 berdasarkan data BKPM untuk Penanaman Modal Asing (PMA) mencapai US\$76.510,9 Ribu sementara Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada periode yang sama mencapai Rp 519,04 miliar. Kinerja PMA pada tahun 2019 dibandingkan tahun sebelumnya meningkat sebesar 1,08 persen. Sementara PMDN Kabupaten Subang pada periode yang sama meningkat pesat sebesar 1,9 kali lipat dibandingkan jumlah investasi pada tahun 2019.

Perkembangan aktivitas investasi Jawa Barat selama kurun lima tahun terakhir (2019-2023) menunjukkan tendensi yang meningkat. Hal ini tercermin dari nilai PMTB adh Berlaku setiap periode terus menerus mengalami kenaikan, tercatat pada tahun 2019 nilai PMTB masih sebesar 10.959,04 miliar rupiah kemudian pada tahun 2023 telah mencapai 13.742,63 miliar rupiah atau selama periode tersebut mengalami penambahan nilai sebesar 2.783,59 miliar rupiah.

Tabel 12. Perkembangan dan Struktur PMTB Kabupaten Subang, 2019 - 2023

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total PMTB					
a.ADHB (Miliar Rp)	10.959,04	10.103,63	11.033,64	12.029,78	13.742,63
b.ADHK 2010 (Miliar Rp)	7.522,52	6.911,88	7.402,14	7.657,51	8.409,56
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	26,87	25,17	26,09	26,06	27,66
Struktur PMTB					
a.Bangunan (Miliar Rp)	7.446,84	7.136,52	7.711,49	8.190,76	9.213,73
(%)	67,95	70,63	69,89	68,09	67,04
b.Non Bangunan (Miliar Rp)	3.512,20	2.967,11	3.322,15	3.839,02	4.528,90
(%)	32,05	29,37	30,11	31,91	32,96
Total PMTB (Miliar Rp)	10.959,04	10.103,63	11.033,64	12.029,78	13.742,63
(%)	(100,00)	(100,00)	(100,00)	(100,00)	(100,00)
Pertumbuhan (%)					
a. Bangunan	8,35	-4,17	8,06	6,22	12,49
b. Non Bangunan	-1,41	-15,52	11,97	15,56	17,97
Total PMTB	5,02	-7,81	9,20	9,03	14,24

* angka sementara **angka sangat sementara

Kinerja PMTB selama lima tahun terakhir (2019-2023) dengan mengamati perubahan nilai PMTB adh Konstan 2010 setiap periode menunjukkan pertumbuhan positif. Peningkatan nilai PMTB adh Konstan 2010 menggambarkan pertumbuhan riil komponen PMTB di Kabupaten Subang selama lima tahun terakhir karena nilainya tidak dipengaruhi oleh kenaikan atau penurunan harga komponen PMTB. Posisi PMTB adh Konstan 2010 pada tahun 2019 masih sebesar 7.522,52 miliar rupiah kemudian pada tahun 2023 telah mencapai 8.409,56 miliar

rupiah atau terjadi laju pertumbuhan sebesar 11,79 persen selama lima tahun terakhir.

Peranan signifikan komponen investasi dalam perekonomian Kabupaten Subang, hal ini dapat dicermati dari peranan komponen PMTB dalam PDRB Kabupaten Subang. Komponen ini memiliki kontribusi kedua terbesar setelah Konsumsi Rumah Tangga dengan rata-rata peranan selama lima tahun terakhir (2019-2023) sebesar 26,37 persen terhadap total PDRB. Kontribusi tertinggi di tahun 2023 yaitu sebesar 27,66 persen dan terendah di tahun 2020 sebesar 25,17 persen.

Komponen PMTB selama 5 (lima) tahun terakhir (2019-2023) memiliki kinerja positif dengan rata-rata pertumbuhan selama periode 2019-2023 sebesar 5,94 persen. Kinerja PMTB pada tahun 2019 sebesar 5,02 persen. Periode 2020 mengalami koreksi pertumbuhan pada angka minus 7,81 persen dan di tahun 2021 kinerja PMTB naik mencapai 9,20 persen, lalu turun di tahun 2022 menjadi 9,03 persen, dan naik kembali di tahun 2023 menjadi 14,24 persen. Hal ini dikarenakan anggaran pemerintah sebagian besar dialihkan untuk percepatan pemulihan covid-19.

Komponen PMTB dalam publikasi ini dibagi menjadi dua jenis yaitu bangunan dan non bangunan. Pengeluaran untuk jenis aset fisik berupa bangunan mendominasi dalam perekonomian Kabupaten Subang. Hal ini terlihat dari proporsi PMTB Bangunan sebesar tiga perlima bagian dari total PMTB, dengan rata-rata kontribusi selama 2019-2023 sebesar 68,72 persen. Peranan komponen PMTB Bangunan terbesar terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 70,63 persen dan terendah terjadi pada tahun 2023 sebesar 67,04 persen. Kontribusi PMTB Bangunan yang signifikan bagi perekonomian Kabupaten Subang mengalami peningkatan selama tiga tahun terakhir, hal ini sejalan dengan kontribusi aktivitas lapangan usaha kategori konstruksi terhadap perekonomian. Peranan lapangan usaha konstruksi selama 2019-2023 secara terus menerus berfluktuatif selama 2019-2023 yaitu 7,78 persen, 6,84 persen, -4,61 persen, 8,24 persen dan 0,51 persen.

Aktivitas pembangunan infrastruktur di Jawa Barat yang dilakukan selama tahun 2023 tentunya akan turut meningkatkan kontribusi PMTB Bangunan. Kegiatan pembangunan tersebut diantaranya adalah 1) Pembangunan pelabuhan konstruksi pelabuhan Patimban, Kabupaten Subang; 2) Pembangunan pelabuhan internasional di Patimban; dan 3) proyek pembangunan ruas Jalan Nasional Cikampek-Subang-Patimban.

Sementara komponen PMTB Non Bangunan terdiri dari : Mesin dan Perlengkapan; Kendaraan; Peralatan lainnya; Tanaman Menghasilkan Produk Berulang; Hewan Menghasilkan Berulang; Produk Kekayaan Intelektual dan Biaya Pemindahan Kepemilikan Aset yang Tidak Diproduksi. Peranan PMTB Non Bangunan rata-rata selama 2019-2023 sebesar 31,28 persen. Peranan terbesar terjadi pada tahun 2023 sebesar 32,96 persen dan terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar 29,37 persen, meskipun demikian proporsi PMTB Non Bangunan selama 2019-2023 selalu di atas 30 persen kecuali tahun 2020 sebesar 29,37 persen.

Kinerja PMTB Bangunan selama 2019-2023 menunjukkan kinerja positif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 6,19 persen, pada tahun 2020 mengalami pertumbuhan terendah sebesar -4,17 persen lalu pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2023 sebesar 12,49 persen. Sementara PMTB Non Bangunan juga mengalami pertumbuhan tertinggi pada tahun 2023 yaitu sebesar 17,97 persen.

3.2.5. Perubahan Inventori

Deskripsi inventori pada unit institusi merupakan persediaan barang yang belum atau tidak digunakan dalam proses produksi, belum selesai diproses atau belum terjual. Sementara perubahan inventori adalah selisih antara nilai inventori pada akhir periode akuntansi dengan nilai inventori pada awal periode akuntansi. Perubahan inventori menjelaskan tentang perubahan posisi barang inventori yang bermakna penambahan atau pengurangan.

Secara makro inventori merupakan bagian dari pembentukan modal atau investasi fisik. Informasi inventori menjelaskan mengenai porsi dari investasi yang

telah terealisasi dalam bentuk barang jadi maupun setengah jadi dalam berbagai aktivitas produksi. Sebagian dari investasi ini direalisasikan untuk keperluan bahan baku maupun bahan penolong.

Komponen Perubahan Inventori merupakan salah satu komponen yang hasilnya bisa memiliki 2 (dua) tanda angka, positif atau negatif (disamping komponen net ekspor antar daerah). Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Kontribusi Perubahan Inventori dalam perekonomian Kabupaten Subang tidak cukup signifikan seperti terlihat pada Tabel 13.

Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis agak rinci, perubahan inventori baru dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan komponen inventori tidak banyak dikaji lebih jauh sebagaimana dilakukan pada komponen pengeluaran lainnya.

Pada tahun 2019 perubahan inventori atas dasar harga berlaku sebesar 1.521,76 miliar rupiah, yang kemudian menurun pada tahun 2020 menjadi sebesar 635,04 miliar rupiah. Pada tahun 2021 terkoreksi minus akibat krisis kesehatan mencapai 384,70 miliar rupiah, kemudian naik pada tahun 2022 menjadi 63,29 miliar rupiah, lalu mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 61,74 miliar rupiah.

Tabel 13. Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kabupaten Subang, 2019 – 2023

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Inventori					
a. ADHB (Miliar RP)	1.521,76	635,04	-384,70	63,29	61,74
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	956,45	397,91	-224,82	36,71	34,25
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	3,73	1,58	-0,91	0,14	0,12

*angka sementara **angka sangat sementara

Sementara itu, proporsi perubahan inventori terhadap total PDRB di Kabupaten Subang mengalami penurunan pada rentang waktu 2019 - 2023. Pada tahun 2019, proporsi perubahan inventori adalah 3,73 persen, selanjutnya 1,58 persen (2020), minus 0,91 persen (2021), 0,14 persen (2022), dan 0,12 persen (2023). Proporsi perubahan inventori tertinggi terdapat pada tahun 2019 dan terendah pada tahun 2021.

3.2.6. Perkembangan Impor Barang Dan Jasa

Komponen Impor Barang dan Jasa merupakan komponen pengurang dalam PDRB Pengeluaran. Pengukuran potensi dan besaran produk domestik dilakukan dengan mengeluarkan komponen Impor Barang dan Jasa dari penghitungan yaitu dengan cara mengurangi nilai PDRB (E) dengan nilai impor. Hasil pengurangan secara konsep sama dengan nilai PDRB menurut lapangan usaha (sektor). Transaksi impor menjelaskan penambahan penyediaan (supply) produk di wilayah ekonomi domestik yang berasal dari non residen.

Transaksi perdagangan yang terjadi antara wisatawan dan pedagang dapat berpeluang membentuk jaringan pemasaran produk-produk domestik ke daerah-daerah lain. Produk sektor industri merupakan pangsa transaksi komoditas yang cukup dominan dalam kegiatan ekspor antarprovinsi, sedangkan jasa hotel,

restoran, jasa angkutan, dan jasa informasi dan komunikasi yang dinikmati oleh wisatawan merupakan bentuk transaksi ekspor jasa.

Tabel 14. Perkembangan Ekspor Impor Barang dan Jasa Kabupaten Subang 2019 - 2023

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Impor (Miliar Rp)	27.143,43	24.808,50	24.531,05	27.109,39	29.768,80
Ekspor (Miliar Rp)	21.333,63	20.620,66	21.712,11	23.873,26	25.529,76
Net (Miliar Rp)	-5.809,80	-4.187,85	-2.818,93	-3.236,13	-4.239,04

* angka sementara **angka sangat sementara

Selama kurun waktu 2019-2023 nilai komponen net ekspor Kabupaten Subang bernilai negatif. Artinya, nilai impor barang dan jasa yang dilakukan Kabupaten Subang melebihi nilai ekspor barang dan jasa. Hal ini menunjukkan ketergantungan Kabupaten Subang akan pasokan barang dan jasa dari luar negeri dan luar provinsi, baik produk pertanian maupun hasil industri pengolahan lainnya.

BAB IV
PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB
PENGELUARAN KABUPATEN SUBANG
2019 - 2023

<https://subangkab.bps.go.id>

Agregat dari PDRB merupakan besaran pokok dan indikator ringkas untuk tujuan analisis ekonomi makro, perbandingan antar waktu maupun antar wilayah. Agregat tersebut merupakan nilai gabungan yang mengukur aspek tertentu dari aktivitas dari keseluruhan ekonomi.

Analisis perkembangan agregat PDRB digunakan dalam analisis sosial ekonomi suatu wilayah yang meliputi perbandingan atau rasio antar komponen seperti perbandingan konsumsi rumah tangga terhadap nilai ekspor, PMTB dan PDRB total. Demikian juga perbandingan antar nilai ekspor terhadap PMTB, nilai PDRB terhadap impor, keseimbangan total penyediaan dengan total permintaan dan neraca perdagangan. Berikut ini akan disajikan beberapa rasio (perbandingan relatif) guna melengkapi analisis, di tengah keterbatasan informasi yang tersedia.

4.1 PDRB (NOMINAL)

Agregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam suatu wilayah ekonomi domestik, di mana di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan. PDRB Pengeluaran merupakan jumlah konsumsi akhir atas barang dan jasa (semua konsumsi kecuali konsumsi antara), yang diukur pada harga pembeli kemudian dikurangi dengan impor barang dan jasa. Dengan demikian nilai PDRB ini, dapat digunakan sebagai ukuran “produktivitas”, karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik.

Series data PDRB Pengeluaran dapat diturunkan menjadi beberapa indikator yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain seperti rumah tangga dan tenaga kerja. Sebagai contoh, untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan suatu wilayah dapat didekati dengan nilai dari data PDRB perkapita.

Tabel 15. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Subang, 2019 - 2023

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (Miliar Rp)					
- ADHB	40.790,68	40.148,32	42.292,91	46.110,39	49.692,22
- ADHK 2010	28.672,90	28.344,32	28.960,91	30.181,57	31.604,98
PDRB perkapita (Ribu Rp)					
- ADHB	25.982,58	25.209,15	26.095,46	28.222,99	30.119,79
- ADHK 2010	18.263,88	17.797,41	17,869,37	18.466,20	19.156,62
Pertumbuhan PDRB perkapita ADHK 2010	5,22	-2,55	0,40	3,34	3,74
Jumlah penduduk (orang)	1.569,92 ¹	1.592,61 ²	1.620,70 ²	1.635,56 ³	1.649,82 ³
Pertumbuhan Jumlah Penduduk (persen)	0,58	1,44	1,76	0,92	0,87

Catatan :

* angka sementara

**angka sangat sementara

¹Hasil Proyeksi Penduduk SUPAS 2015

²Hasil Proyeksi Penduduk Interim

³Hasil Proyeksi SP2020

Selama lima tahun terakhir (2019-2023) besaran PDRB perkapita terus mengalami peningkatan (Tabel 15), sejalan dengan bertambahnya besaran PDRB, meskipun di satu sisi jumlah penduduk Kabupaten Subang mengalami peningkatan. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Kabupaten Subang secara rata-rata mampu menciptakan PDRB atau (nilai tambah) sebesar nilai perkapita di masing-masing tahun tersebut.

PDRB perkapita Kabupaten Subang di tahun 2019 mencapai Rp. 25.982,58 ribu rupiah dan di tahun 2023 meningkat hingga mencapai Rp 30.119,79 ribu rupiah. Laju PDRB perkapita pada tahun 2019 mencapai 5,22 persen dan di tahun 2020 laju PDRB per kapita terkoreksi minus 2,55 dan merupakan pertumbuhan terendah selama kurun 2019-2020. Laju PDRB per kapita kembali meningkat di tahun 2021 menjadi sebesar 0,40 persen, lalu tahun 2022 mencapai sebesar 3,34 persen, dan di tahun 2023 mencapai sebesar 3,74 persen.

4.2 PROPORSI PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR TERHADAP PDRB

Yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan berbagai produk barang dan jasa akhir (baik berasal dari produk domestik maupun impor), untuk menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah. Walaupun ketiga institusi tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi, tetapi sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir.

Tabel 16. Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kabupaten Subang, 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Akhir (ADHB) (Miliar Rp)					
a. Rumah tangga	30.020,85	29.571,80	30.363,43	33.104,43	35.645,44
b. LNPRT	320,46	314,11	323,78	346,06	389,53
c. Pemerintah	3.778,37	3.711,59	3.775,70	3.852,96	4.091,91
Jumlah	34.119,67	33.597,50	34.462,91	37.303,45	40.126,89
PDRB (ADHB) (Miliar Rp)	40.790,68	40.148,32	42.292,91	46.160,40	49.692,22
Proporsi	83,65	83,68	81,49	80,81	80,75

* angka sementara **angka sangat sementara

Tabel 16, menggambarkan proporsi total konsumsi akhir dari rumah tangga, LNPRT dan pemerintah terhadap PDRB Kabupaten Subang di tahun 2023 sebesar rata-rata 82,07 persen. Hal ini berarti bahwa total penggunaan konsumsi akhir diatas 80 persen dari PDRB yang tercipta. Sebagian besar digunakan untuk konsumsi rumah tangga kemudian diikuti oleh konsumsi pemerintah dan terakhir konsumsi LNPRT. Perkembangan nilai konsumsi akhir dari tahun 2019 sampai dengan 2023 setiap tahunnya mengalami fluktuatif. Sementara jika diamati proporsi konsumsi akhir terhadap seluruh aktivitas perekonomian menunjukkan

trend yang meningkat, meskipun pada tahun 2020 mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa pembentukan PDRB yang digunakan untuk PMTB dan ekspor masih belum optimal, untuk itu diperlukan terobosan untuk meningkatkan investasi dan ekspor Kabupaten Subang guna meningkatkan aktivitas ekonomi, terutama sector-sektor yang menjadi unggulan Kabupaten Subang.

<https://subangkab.bps.go.id>

<https://subangkab.bps.go.id>

BAB V ***PENUTUP***

1. PDRB menurut pengeluaran tahun 2019 - 2023 dapat menggambarkan perubahan struktur dan perkembangan kondisi ekonomi Kabupaten Subang pada periode bersangkutan. Analisis ekonomi dari sisi PDRB pengeluaran akan berbeda dengan analisis dari sisi lapangan usaha (industri) yang lebih fokus pada perilaku produksi. Analisis PDRB pengeluaran terfokus pada perilaku penggunaan barang dan jasa akhir, baik untuk tujuan konsumsi akhir, investasi (fisik), maupun perdagangan luar daerah. Empat kelompok sektor atau pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian adalah rumah tangga, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga/LNPRT, pemerintah, dan perusahaan.
2. Publikasi ini menyajikan analisis sederhana tentang perilaku konsumsi, investasi, dan perdagangan luar negeri dan perdagangan antar daerah yang dimaksud. Analisis didasarkan pada indikator yang diturunkan dari PDRB pengeluaran. Analisis tersebut juga dilengkapi dengan indikator sosial demografi (seperti penduduk, dan rumah tangga), sehingga hasil analisis yang disajikan menjadi lebih informatif.
3. Data dapat disajikan dalam bentuk series data dari tahun 2019 - 2023, sehingga mudah di dalam menggambarkan perubahan atau kecenderungan yang terjadi antara waktu. Masing-masing parameter disajikan dalam satuan yang berbeda (rupiah, indeks, persentase, rasio, unit, dsb) sesuai dengan tujuan analisis dan karakteristik masing-masing data.
4. Data dan indikator yang diturunkan dari sajian data PDRB menurut pengeluaran, dapat dijadikan acuan bagi pengembangan dan perluasan indikator ekonomi makro lain seperti pendapatan disposabel, tabungan, serta model ekonomi sederhana yang saling berkaitan antara seluruh variabel ekonomi dan variabel yang tersedia. Bahkan secara langsung maupun tidak langsung dapat dikaitkan dengan tampilan data ekonomi

makro lain seperti PDRB menurut lapangan usaha (industri), Tabel Input-Output.

5. Sebagian data tentang interaksi dengan luar daerah (*external account*) secara agregat disajikan di sini, seperti ekspor dan impor. Transaksi eksternal ini menggambarkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi Kabupaten Subang terhadap ekonomi luar daerah.

<https://subangkab.bps.go.id>

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. 2016. *Pedoman Penyusunan PDRB Kab/Kota Tahun Dasar 2010 menurut Pengeluaran*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Tim Penerjemah SNA 2008 Badan Pusat Statistik. 2008. *Sistem Neraca Nasional 2008*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

United Nations. 2009. *System of National Accounts 2008 (2008 SNA)*. New York: United Nations

<https://subangkab.bps.go.id>

<https://subangkab.bps.go.id>

LAMPIRAN

**Lampiran 1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Pengeluaran Kabupaten Subang (juta rupiah), 2019 - 2023**

KOMPONEN PENGELUARAN	2019	2020	2021 ^R	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	30,020,851.54	29,571,802.75	30,363,426.24	33,104,429.62	35,645,444.47
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	11,603,056.42	11,835,134.16	12,333,352.66	13,562,732.21	14,614,124.02
b. Pakaian dan Alas Kaki	1,567,533.59	1,529,268.72	1,549,714.80	1,637,320.49	1,750,781.49
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	3,470,630.37	3,483,383.13	3,487,776.34	3,719,304.82	3,829,505.02
d. Kesehatan dan Pendidikan	1,365,063.32	1,417,089.48	1,484,547.61	1,571,275.68	1,613,456.13
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi & Budaya	8,338,293.00	7,581,048.29	7,692,705.59	8,508,579.15	9,556,394.36
f. Hotel dan Restoran	380,893.73	370,839.92	377,502.03	411,204.19	449,613.70
g. Lainnya	3,295,381.11	3,355,039.05	3,437,827.22	3,694,013.08	3,831,569.76
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	320,455.32	314,109.03	323,780.73	346,060.64	389,529.26
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	3,778,367.60	3,711,591.92	3,775,699.51	3,852,957.46	4,091,914.70
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	10,959,043.79	10,103,626.93	11,033,639.71	12,029,784.51	13,742,631.32
a. Bangunan	7,446,841.15	7,136,515.50	7,711,489.01	8,190,764.09	9,213,730.05
b. Non Bangunan	3,512,202.64	2,967,111.42	3,322,150.70	3,839,020.43	4,528,901.26
5. Perubahan Inventori	1,521,762.55	635,036.25	(384,703.24)	63,291.21	61,744.21
6. Net Ekspor Impor Antar Daerah	(5,809,800.40)	(4,187,848.79)	(2,818,932.44)	(3,236,127.44)	(4,239,039.99)
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	40,790,680.41	40,148,318.10	42,292,910.51	46,160,396.01	49,692,223.97

^R Angka Perbaikan

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

**Lampiran 2. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan
Menurut Pengeluaran Kabupaten Subang (juta rupiah), 2019 - 2023**

KOMPONEN PENGELUARAN	2019	2020	2021 ^R	2022 [*]	2023 ^{**}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	20,343,149.82	19,688,288.90	19,876,235.16	20,815,905.99	21,455,567.07
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	6,719,251.19	6,748,088.29	6,889,132.71	7,240,159.31	7,418,909.39
b. Pakaian dan Alas Kaki	1,148,757.37	1,085,651.86	1,088,172.94	1,127,011.24	1,173,269.40
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	2,484,585.41	2,467,302.41	2,448,116.63	2,549,677.63	2,574,864.35
d. Kesehatan dan Pendidikan	1,018,861.28	1,032,643.13	1,066,142.59	1,097,717.54	1,098,225.91
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi & Budaya	6,398,461.16	5,819,280.79	5,847,197.58	6,206,009.79	6,573,837.08
f. Hotel dan Restoran	296,662.88	286,277.74	288,034.57	302,790.55	320,629.27
g. Lainnya	2,276,570.53	2,249,044.67	2,249,438.13	2,292,539.91	2,295,831.66
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	221,265.81	212,795.38	216,297.36	223,420.24	243,475.37
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2,303,128.31	2,228,819.00	2,236,469.82	2,195,459.04	2,264,089.88
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	7,522,519.47	6,911,875.86	7,402,139.72	7,657,514.22	8,409,559.95
a. Bangunan	5,230,557.82	4,989,382.16	5,304,228.84	5,329,381.99	5,787,619.45
b. Non Bangunan	2,291,961.65	1,922,493.70	2,097,910.89	2,328,132.23	2,621,940.51
5. Perubahan Inventori	956,454.55	397,906.70	(224,822.48)	36,714.28	34,250.28
6. Net Ekspor Impor Antar Daerah	(2,673,617.99)	(1,095,369.50)	(545,425.63)	(726,429.18)	(801,962.41)
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	28,672,899.97	28,344,316.34	28,960,893.95	30,202,584.58	31,604,980.14

^R Angka Perbaikan

^{*} Angka Sementara

^{**} Angka Sangat Sementara

Lampiran 3. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Subang (persen), 2019-2023

KOMPONEN PENGELUARAN	2019	2020	2021 ^R	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	73,60	73,66	71,79	71,72	71,73
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	28,45	29,48	29,16	29,38	29,41
b. Pakaian dan Alas Kaki	3,84	3,81	3,66	3,55	3,52
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	8,51	8,68	8,25	8,06	7,71
d. Kesehatan dan Pendidikan	3,35	3,53	3,51	3,40	3,25
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi & Budaya	20,44	18,88	18,19	18,43	19,23
f. Hotel dan Restoran	0,93	0,92	0,89	0,89	0,90
g. Lainnya	8,08	8,36	8,13	8,00	7,71
2. Pengeluaran Konsumsi LNPR	0,79	0,78	0,77	0,75	0,78
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	9,26	9,24	8,93	8,35	8,23
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	26,87	25,17	26,09	26,06	27,66
a. Bangunan	18,26	17,78	18,23	17,74	18,54
b. Non Bangunan	8,61	7,39	7,86	8,32	9,11
5. Perubahan Inventori	3,73	1,58	-0,91	0,14	0,12
6. Net Ekspor Impor Antar Daerah	-14,24	-10,43	-6,67	-7,01	-8,53
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

^R Angka Perbaikan

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Lampiran 4. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Kabupaten Subang (persen), 2019-2023

KOMPONEN PENGELUARAN	2019	2020	2021 ^R	2022 [*]	2023 ^{**}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	70,95	69,46	68,63	68,92	67,89
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	23,43	23,81	23,79	23,97	23,47
b. Pakaian dan Alas Kaki	4,01	3,83	3,76	3,73	3,71
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	8,67	8,70	8,45	8,44	8,15
d. Kesehatan dan Pendidikan	3,55	3,64	3,68	3,63	3,47
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi & Budaya	22,32	20,53	20,19	20,55	20,80
f. Hotel dan Restoran	1,03	1,01	0,99	1,00	1,01
g. Lainnya	7,94	7,93	7,77	7,59	7,26
2. Pengeluaran Konsumsi LNPR	0,77	0,75	0,75	0,74	0,77
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	8,03	7,86	7,72	7,27	7,16
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	26,24	24,39	25,56	25,35	26,61
a. Bangunan	18,24	17,60	18,32	17,65	18,31
b. Non Bangunan	7,99	6,78	7,24	7,71	8,30
5. Perubahan Inventori	3,34	1,40	-0,78	0,12	0,11
6. Net Ekspor Impor Antar Daerah	-9,32	-3,86	-1,88	-2,41	-2,54
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

^R Angka Perbaikan

^{*} Angka Sementara

^{**} Angka Sangat Sementara

Lampiran 5. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Subang (persen), 2019-2023

KOMPONEN PENGELUARAN	2019	2020	2021 ^R	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	6,34	-1,50	2,68	9,03	7,68
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	8,32	2,00	4,21	9,97	7,75
b. Pakaian dan Alas Kaki	9,07	-2,44	1,34	5,65	6,93
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	3,88	0,37	0,13	6,64	2,96
d. Kesehatan dan Pendidikan	7,12	3,81	4,76	5,84	2,68
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi & Budaya	4,43	-9,08	1,47	10,61	12,31
f. Hotel dan Restoran	5,78	-2,64	1,80	8,93	9,34
g. Lainnya	5,58	1,81	2,47	7,45	3,72
2. Pengeluaran Konsumsi LNPR	4,49	-1,98	3,08	6,88	12,56
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	3,71	-1,77	1,73	2,05	6,20
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	5,02	-7,81	9,20	9,03	14,24
a. Bangunan	8,35	-4,17	8,06	6,22	12,49
b. Non Bangunan	-1,41	-15,52	11,97	15,56	17,97
5. Perubahan Inventori					
6. Net Ekspor Impor Antar Daerah					
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	8,72	-1,57	5,34	9,14	7,65

^R Angka Perbaikan

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Lampiran 6. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Kabupaten Subang (persen), 2019-2023

KOMPONEN PENGELUARAN	2019	2020	2021 ^R	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	3,95	-3,22	0,95	4,73	3,07
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	5,48	0,43	2,09	5,10	2,47
b. Pakaian dan Alas Kaki	3,60	-5,49	0,23	3,57	4,10
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	2,06	-0,70	-0,78	4,15	0,99
d. Kesehatan dan Pendidikan	4,14	1,35	3,24	2,96	0,05
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi & Budaya	3,59	-9,05	0,48	6,14	5,93
f. Hotel dan Restoran	4,54	-3,50	0,61	5,12	5,89
g. Lainnya	2,62	-1,21	0,02	1,92	0,14
2. Pengeluaran Konsumsi LNPR	2,79	-3,83	1,65	3,29	8,98
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	3,00	-3,23	0,34	-1,83	3,13
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	2,89	-8,12	7,09	3,45	9,82
a. Bangunan	6,25	-4,61	6,31	0,47	8,60
b. Non Bangunan	-4,04	-16,12	9,12	10,97	12,62
5. Perubahan Inventori					
6. Net Ekspor Impor Antar Daerah					
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	4.61	(1.15)	2.18	4.29	4.64

^R Angka Perbaikan

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

**Lampiran 7. Indeks Perkembangan Implisit Produk Domestik Regional Bruto
(2010=100) Menurut Pengeluaran Kabupaten Subang (persen), 2019-2023**

KOMPONEN PENGELUARAN	2019	2020	2021 ^R	2022 [*]	2023 ^{**}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	147,57	150,20	152,76	159,03	166,14
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	172,68	175,38	179,03	187,33	196,98
b. Pakaian dan Alas Kaki	136,45	140,86	142,41	145,28	149,22
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	139,69	141,18	142,47	145,87	148,73
d. Kesehatan dan Pendidikan	133,98	137,23	139,24	143,14	146,91
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi & Budaya	130,32	130,27	131,56	137,10	145,37
f. Hotel dan Restoran	128,39	129,54	131,06	135,80	140,23
g. Lainnya	144,75	149,18	152,83	161,13	166,89
2. Pengeluaran Konsumsi LNPR	144,83	147,61	149,69	154,89	159,99
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	164,05	166,53	168,82	175,50	180,73
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	145,68	146,18	149,06	157,10	163,42
a. Bangunan	142,37	143,03	145,38	153,69	159,20
b. Non Bangunan	153,24	154,34	158,36	164,90	172,73
5. Perubahan Inventori					
6. Net Ekspor Impor Antar Daerah					
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	142.26	141.65	146.03	152.84	157,23

^R Angka Perbaikan

^{*} Angka Sementara

^{**} Angka Sangat Sementara

Lampiran 8. Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100) Menurut Pengeluaran Kabupaten Subang (persen), 2019-2023

KOMPONEN PENGELUARAN	2019	2020	2021 ^R	2022 [*]	2023 ^{**}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	2,30	1,78	1,71	4,11	4,47
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	2,69	1,56	2,08	4,64	5,16
b. Pakaian dan Alas Kaki	5,28	3,23	1,10	2,01	2,71
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	1,78	1,07	0,91	2,39	1,96
d. Kesehatan dan Pendidikan	2,87	2,43	1,47	2,80	2,64
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi & Budaya	0,81	-0,03	0,99	4,21	6,03
f. Hotel dan Restoran	1,18	0,89	1,18	3,62	3,26
g. Lainnya	2,88	3,06	2,45	5,43	3,58
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,65	1,92	1,41	3,47	3,29
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	0,69	1,51	1,38	3,95	2,98
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	2,07	0,34	1,97	5,39	4,02
4.a. Bangunan	1,98	0,47	1,64	5,71	3,58
4.b. Non Bangunan	2,75	0,72	2,60	4,13	4,75
5. Perubahan Inventori					
6. Net Ekspor Impor Antar Daerah					
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	3.92	-0.43	3.10	4.66	2,87

^R Angka Perbaikan

^{*} Angka Sementara

^{**} Angka Sangat Sementara

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

— *Enlighten The Nation* —



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN SUBANG**
BPS-Statistics of Subang Regency

Jalan Aipda KS Tubun No. 12 Subang 41211, Telp. (0260) 411101, Fax. (0260) 411101;
E-mail: bps3213@bps.go.id Homepage: <http://subangkab.bps.go.id>